

**EVALUASI PROGRAM TRANSMIGRASI
(STUDI KASUS PROGRAM TRANSMIGRASI DI DISTRIK
KURIK, MUTING DAN SEMANGGA KABUPATEN
MERAUKE)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

**Diajukan Oleh :
RINNO BAHARI ADI PRADANA**

NIM : P0800216403



**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2018**

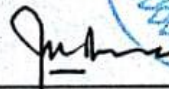
TESIS

**EVALUASI PROGRAM TRANSMIGRASI (STUDI KASUS PROGRAM
TRANSMIGRASI DI DISTRIK KURIK, MUTING, DAN SEMANGGA
KABUPATEN MERAUKE)**

Disusun dan diajukan oleh
RINNO BAHARI ADI PRADANA
Nomor Pokok P0800216403

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **01 November 2018**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

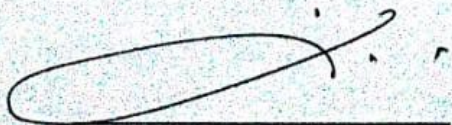
Menyetujui
Komisi Penasihat



Dr. H. M. Thahir Haning, M.Si.

Ketua

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan,



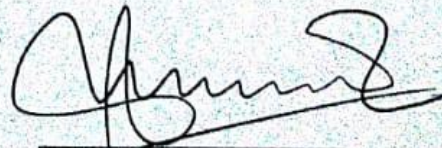
Dr. H. Muhammad Yunus, MA.



Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

Pernyataan Keaslian Tesis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINNO BAHARI ADI PRADANA

NIM : P0800216403

Jurusan : Administrasi Pembangunan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Makassar, 01 November 2018
Yang Menyatakan,

Rinno Bahari Adi Pradana
P0800216403

Halaman Motto Dan Persembahan

MOTTO

“Ilmu Pengetahuan Akan Berarti Jika diamalkan”

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Makmur dan Ibu Suciati, adikku Demi Triatma Kusumawardani yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan kepada penulis.

Tri Ayu Yulandasari yang selama ini telah memberiku semangat, doa dan cinta yang begitu besar.

Abstrak

ABSTRAK

RINNO BAHARI ADI PRADANA. *Evaluasi Program Transmigrasi (Studi Kasus Program Transmigrasi di Distrik Kurik, Muting, dan Semangga Kabupaten Merauke (dibimbing oleh Mohamad Thahir Haning dan Muhammad Tang Abdulllah).*

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi program transmigrasi di Kabupaten Merauke. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap 11 orang informan. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Merauke berjalan sesuai dengan tujuan transmigrasi yaitu pemerataan jumlah penduduk, perataan pembangunan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat trans maupun masyarakat lokal. Secara keseluruhan program transmigrasi di Kabupaten Merauke telah berhasil dalam pembangunan daerah, serta berhasil meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Demikian pula ada beberapa wilayah transmigrasi telah berkembang menjadi pusat perekonomian baru dan menjadi wilayah administratif baru. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada faktor lain yang juga turut membantu keberhasilan program transmigrasi, yaitu adanya kegiatan perekonomian lintas sektoral sehingga perekonomian masyarakatnya dapat meningkat bila dilihat dari sebelum transmigrasi sampai sesudah transmigrasi.

Kata kunci: Evaluasi, Program Transmigrasi.



ABSTRACT

RINNO BAHARI ADI PRADANA. *Evaluation of The Transmigration Program: A Case Study of Transmigration Program in Kurik District, Muting, and Semangga of Merauke Regency* (supervised by **Mohammad Thahir Haning** and **Muhammad Tang Abdullah**)

This study aims to describe the evaluation of transmigration program in Merauke Regency.

To get the data of the study, researcher interviewed 11 informants. Data analysis used qualitative analysis method. This study used a descriptive approach with qualitative methods. The results of research seen from four indicators showed that the transmigration program in Merauke regency ran according to transmigration purposes that were equal distribution of population, equitable development, and improving the economy of transmigration and local communities. Overall, transmigration programs in Merauke regency were successful in regional development, manage to improve the economy of the community, and several transmigration areas had developed into new economic centers and become new administrative regions.

The findings in the field indicate that there are other factors that also help the success of the transmigration program, namely the existence of cross-cutting activities of the economy so that the economy of the society can increase when viewed from before the transmigration until after the transmigration.

Keywords: evaluation, the transmigration program.



1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Muhammad Yunus, MA. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Dr. Mohamad Thahir Haning, M.Si. dan Dr. Muhammad Tang Abdullah, S.Sos., MAP. Sebagai komisi penasihat yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran membimbing penulis dalam penyusunan Tesis ini, tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. H. Sulaiman Asang, Ibu Dr. Hamsinah, M.Si dan Ibu Dr. Hasniati, M.Si selaku dewan penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Kepada Rektor Universitas Musamus Merauke yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Para Dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pada masa perkuliahan hingga penyusunan Tesis serta bantuannya dalam pengurusan kepentingan perkuliahan.
7. Kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Merauke, Kepala Distrik Kurik, Kepala Distrik Muting dan Kepala

Distrik Semangga yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.

8. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Makmur dan Ibu Suciati, adik tersayang Demi Triatma Kusuma Wardani Bapak Slamet Budiono dan Ibu Nurhayati, Ibu Dr. Fitriani, S.Kom.,M.Si dan kekasih tercinta Tri Ayu Yulandasari yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan perhatiannya dari awal menjalani perkuliahan, penyusunan proposal hingga Tesis ini.
9. Teman-teman Sekolah Pascasarjana Administrasi Pembangunan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi dan arahan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
10. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis mulai dari proses penyusunan hingga penyelesaian Tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Assalamuallaikum, wr.wb

Makassar, 2018

Penulis
Rinno Bahari Adi Pradana

Daftar Isi

Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Lampiran.....	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kebijakan Publik	13
B. Pelaksanaan Program	14
C. Evaluasi Kebijakan	19

D.	Sejarah Program Transmigrasi	27
1.	Sejarah dan Perkembangan Transmigrasi	29
2.	Transmigrasi Di Indonesia	36
3.	Transmigrasi Di Papua	39
E.	Dampak Perubahan Sosial Ekonomi.....	46
F.	Penelitian Terdahulu	48
G.	Kerangka Pikir.....	49
BAB III Metode Penelitian.....		52
A.	Desain Penelitian.....	52
B.	Lokasi Penelitian	52
C.	Informan.....	52
D.	Pengumpulan Data	53
E.	Fokus Penelitian	53
F.	Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1.	Kondisi Geografis Kabupaten Merauke	57
2.	Profil Distrik Kurik Kabupaten Merauke	58
3.	Profil Distrik Semangga Kabupaten Merauke	62
4.	Profil Distrik Muting Kabupaten Merauke	66

B.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	68
a.	Efektivitas.....	74
b.	Efisiensi.....	85
c.	Perataan.....	91
d.	Ketepatan.....	98
BAB V	PENUTUP.....	123
A.	Kesimpulan.....	123
B.	Saran	125
Daftar Pustaka.....		127
Lampiran.....		129
Pedoman Wawancara		131

Daftar Tabel

Tabel 1 Nama Kampung Distrik Kurik	61
Tabel 2 Jumlah Penduduk Distrik Kurik	61
Tabel 3 Nama Kampung Distrik Semangga	64
Tabel 4 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi	74
Tabel 5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Daerah Transmigrasi	89
Tabel 6 Data Statis Sarana Dan Prasarana Umum Distrik Semangga	98
Tabel 7 Data Statis Sarana Dan Prasarana Umum Distrik	99
Tabel 8 Sarana Pendidikan Distrik Semangga	104
Tabel 9 Sarana Pendidikan Distrik Muting	105
Tabel 10 Sarana Pendidikan Distrik Kurik	106
Tabel 11 Jumlah Penduduk Per Kabupaten Di Provinsi Papua	109
Tabel 12 Jumlah Penduduk Per Distrik Di Kabupaten Merauke	111
Tabel 13 Jumlah Produktivitas Padi Distrik Di Kabupaten Merauke	112
Tabel 14 Jumlah <i>Surplus or Devisit</i> Padi Per Distrik	114
Tabel 15 Jumlah Penduduk Per Kabupaten Di Provinsi Papua	116
Tabel 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke	122

Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	55
Gambar 2 Ruas Jalan Kawasan Transmigrasi.....	76
Gambar 3 Kondisi Jalanan Kawasan Transmigrasi.....	77
Gambar 4 Ruas Jalan Kuprik-Semangga, Kampung Kuper.....	78
Gambar 5 Ruas Jalan Wendu-Kumbe, Kampung Matara.....	79
Gambar 6 Ruas Jalan Semangga-Tanah Miring.....	80
Gambar 7 Ruas Jalan Tanah Miring-Salor.....	82
Gambar 8 Ruas Jalan Salor-Kurik.....	82
Gambar 9 Ruas Jalan Kurik-Kumbe.....	83
Gambar 10 Jembatan Penghubung Kota Merauke.....	87
Gambar 11 Lokasi Pemukiman Dan Areal Pertanian.....	88
Gambar 12 Pasar Lokal.....	93
Gambar 13 Pasar Lokal Distrik Kurik.....	94
Gambar 14 Ruas Jalan Kampung Semangga.....	95

Lampiran

Dokumentasi.....	102
Pedoman Wawancara.....	105

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Transmigrasi merupakan kegiatan perpindahan penduduk yang bertujuan untuk pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan penduduk di wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, membuka pusat pertumbuhan ekonomi di daerah baru, membuka kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan di daerah baru. Transmigrasi juga merupakan bentuk dari mobilitas penduduk yang memiliki peran, tujuan, dan tata cara yang berbedadan berkaitan dengan pembangunan daerah maupun pembangunan dalam skala nasional serta memanfaatkan secara lebih optimal potensi sumberdaya alam guna meningkatkan taraf hidup transmigran dan mengurangi tekanan kepadatan penduduk. (Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2011)

Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. Pertama, meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). Kedua, membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi), dan ketiga, mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.¹⁾ Esensi dari ketiga sasaran tersebut diharapkan dapat

membangun komunitas masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya wilayah dan pengarahannya perpindahan penduduk. (Pasal 4 UU no. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian)

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Di Indonesia ada beberapa jenis transmigrasi antara lain Transmigrasi umum, transmigrasi khusus, transmigrasi spontan, transmigrasi swakarya, transmigrasi lokal, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi sektoral. Transmigrasi yang umumnya dilaksanakan adalah transmigrasi umum, transmigrasi swakarya dan transmigrasi lokal.

Program transmigrasi merupakan bagian dari program pembangunan daerah maupun nasional. Dalam perkembangannya transmigrasi di Papua secara khusus di Kabupaten Merauke Distrik Kurik telah membawa dampak terhadap perekonomian pada masyarakat kurik, seperti perkembangan pada bidang pertanian, pengembangan wilayah termasuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor yang merupakan bagian dari program transmigrasi, serta meningkatnya produksi beras, dapat terlihat bahwa Kabupaten Merauke menjadi Kabupaten dengan tingkat produktivitas padi sebesar 84% untuk Provinsi Papua, dimana seluruh produksi beras dihasilkan dari daerah-daerah yang dihuni oleh

transmigran. 43,79% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Merauke adalah para transmigran yang datang dari pulau Jawa.

Menurut Martono (1986) apabila dilihat dari definisi demografi, transmigrasi merupakan bagian dari migrasi yang merupakan salah satu komponen perubahan atau pertumbuhan penduduk dengan tujuan pembangunan. Artinya, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru dan untuk membantu pembangunan nasional.

Transmigrasi berperan penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di suatu daerah karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah atau bagian integral dari pembangunan, melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi. (Fudoli : 2001)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri, hingga saat ini sudah terbentuk 23 kawasan transmigrasi. Lokasi tersebut diantaranya, Kawasan Salor di Kabupaten Merauke; Kawasan Kobisonta, di Kabupaten Maluku Tengah; Kawasan Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Bungku di Kabupaten Morowali; Kawasan Pawonsari di Kabupaten Boalemo, Kawasan Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Gerbang Kayong di Kabupaten Kayong Utara dan Kawasan Telang di Kabupaten Banyuasin. Sebelum terbentuk menjadi kawasan transmigrasi, pemerintah telah menetapkan 48 Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi yakni membuka keterisolasian daerah terpencil dan telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung/poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M² di seluruh kawasan transmigrasi. Jika dilihat dari tujuannya, pemerintah berupaya untuk menekan kepadatan jumlah penduduk dan juga untuk pemerataan pembangunan di setiap daerah melalui program transmigrasi.

Pada tahun 1905 pemerintah Belanda memulai transmigrasi dengan nama kolonisasi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang ada di pulau Jawa, pada saat itu penduduk pulau Jawa mencapai 80,6% dari seluruh penduduk Indonesia, kemudian pada tanggal 12 Desember 1950, Pemerintah Indonesia secara resmi melanjutkan program kolonisatie yang telah dirintis pemerintah Belanda dengan nama transmigrasi (Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Daerah tujuan transmigrasi meliputi, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Transmigrasi di Papua dimulai sejak tahun 1969 hingga tahun 1999, jenis transmigrasi yang masuk di Papua adalah jenis transmigrasi swakarsa mandiri, para penduduk datang dari luar Papua dengan biaya pribadi. Pada awal kedatangannya, para transmigran diberikan lahan kosong oleh pemerintah yang kemudian dikelola oleh transmigran yang mayoritasnya adalah para petani.

Salah satu yang menjadi daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Papua adalah Distrik Kurik, Distrik ini merupakan sebuah distrik yang berada di wilayah Kabupaten Merauke. Distrik Kurik lahir sebagai daerah transmigrasi pertama kali pada tahun 1982-1983 yang terbagi menjadi 12 kampung dan salah satunya adalah kampung Kurik.

Distrik kurik sebagai kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi kawasan yang bisa dikatakan telah berkembang dalam bidang pertanian dan perkebunan, serta dilihat dari aspek pembangunannya, distrik kurik telah berkembang pesat diantara daerah transmigrasi lain di Kabupaten Merauke seperti Distrik Muting dan Distrik Semangga,serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan menjadi lumbung pangan perkotaan.

Beberapa wilayah transmigrasi di Merauke merupakan daerah pengembangan transmigrasi yaitu daerah/wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Wilayah Pengembangan Transmigrasi penetapannya didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.214/Men/V/2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi.

Bila pembangunan daerah diukur dengan persentase penambahan penduduk, jumlah hektare lahan yang dibuka, luas garapan, dan peningkatan produksi pertanian pada provinsi tujuan, maka kontribusi transmigrasi tidak disangsikan lagi. Transmigrasi dikatakan berhasil apabila ada penambahan penduduk di wilayah tersebut, jumlah hektar lahan yang dibuka serta luas garapan dan peningkatan pada produksi pertanian pada daerah tujuan transmigrasi.

Pembukaan areal dengan luas wilayah kurang lebih 96.340 Ha terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha, serta areal perkebunan seluas 59.840 Ha di daerah Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor Distrik Kurik yang akan diintegrasikan dengan program *Merauke Integrated Food and Energy State* (MIFEE).

Menurut Suparno (2007) transmigrasi tidak sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah lain. Lebih dari itu, transmigrasi adalah cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan.

Kabupaten Merauke menjadi penyangga kestabilan pangan dengan ketersediaan beras untuk beberapa Kabupaten di Provinsi Papua bahkan Merauke telah memiliki *Memorandum of understanding* (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam penjatahan beras untuk Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua, dimana beras-beras tersebut dipasok dari Kabupaten Merauke.

Dari data Badan Pusat statistik Kabupaten Merauke pada sensus pertanian tahun 2016 menunjukkan bahwa produksi beras di Kabupaten Merauke sebesar 190.469 ton atau 84% dari produksi beras di Provinsi Papua, untuk produksi padi terbesar yaitu Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang memproduksi padi sebanyak 61.141,50 ton, dan yang terkecil ada pada Distrik Sota dengan produksi yang hanya sebesar 55,09 ton, sementara untuk luas panen Distrik Tanah Miring memiliki luas panen terbesar yaitu 13.587,00 hektar dan luas panen terkecil ada di Distrik Sota dengan luas panen hanya 16,25 hektar hektar. Selain Merauke, ada dua kabupaten lain di Papua yang juga menghasilkan beras yakni Manokwari dan Nabire. Namun jumlah hasil panen di wilayah itu masih rendah jika dibandingkan dengan Merauke, misalnya untuk Kabupaten Manokwari hanya menghasilkan sekitar 600 ton beras.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova (2016) mengenai “Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat : Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya”, hasil penelitian menunjukkan bahwa program transmigrasi ternyata telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat kecamatan timpeh. Transmigrasi membentuk identitas baru sosial, budaya masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Umami (2010) tentang “Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep“, dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa program migrasi berdampak pada ekonomi yang meliputi transformasi pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, serta pola konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi bisa dikatakan meningkat, hal ini tergambar dari wawancara yang dilakukan sebagai data dan informasi awal oleh kepala kampung Distrik Kurik sebagai salah satu kawasan transmigrasi, mengatakan bahwa tingkat perekonomian masyarakatnya tinggi, sudah banyak warga yang memiliki rumah semi permanen, baik masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal. Profesi masyarakat kurik rata-rata berdagang dan bertani, namun ada pula yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, PNS, dan Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.

Warga transmigran yang berada di kawasan-kawasan transmigrasi umumnya berasal dari berbagai daerah dan juga latar belakang yang berbeda, tetapi warga transmigran mempunyai misi yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dalam segi ekonomi khususnya. Sampai saat ini Kampung Kurik masih menjadi daerah yang maju dari pada daerah yang lainnya, karena sejak tahun 2000 sampai pada tahun 2010 mengalami peningkatan baik dalam segi pembangunan dan ekonominya, walaupun hal ini bisa di bilang sangat lamban.

Dampak program transmigrasi tersebut menjadikan distrik kurik sebagai daerah yang pembangunannya cukup pesat, dapat dilihat dari segi pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses menuju pusat kota yang ada di distrik Merauke yang sebagian besar sudah diaspal, lalu ketersediaan sarana komunikasi yang sudah memiliki akses *Internet*, terdapat bangunan pendidikan formal dari Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah Atas, tempat peribadahan seperti Masjid, Gereja dan Pura. Dari segi perekonomian masyarakat kurik penghasilannya didapatkan dari pertanian dan perkebunan sebagai komoditasnya.

Hubungan sosial antara masyarakat pendatang (transmigran) dengan masyarakat asli pun terjalin baik dan nyaris tidak ada konflik antar kelompok. Dengan adanya program transmigrasi, telah membawa banyak perubahan dan perkembangan untuk distrik kurik.

Permasalahan yang terjadi adalah dari beberapa lokasi transmigrasi, hanya ada dua yang dapat dikatakan berhasil, yaitu Distrik Kurik dan Distrik Semangga, sedangkan lokasi transmigrasi lain seperti wilayah Kota Terpadu Mandiri yang terletak di Distrik Salor dan Distrik Muting masih belum berhasil. Kota terpadu mandiri sendiri terletak di wilayah distrik kurik sekitar 50 KM dari pusat kota Merauke. Pembiayaan pembangunan KTM Salor ini dilakukan secara *Sharing coast* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan dana yang cukup besar dan ditambah lagi dengan kerjasama antar investor swasta. Namun yang terlihat saat ini kondisi KTM Salor tidak seperti yang diharapkan,

misalnya kondisi jalanan yang rusak, kantor-kantor yang dialih fungsikan (tidak terpakai) dan program transmigrasi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat lokal. Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya data fiktif penerima bantuan lahan dari program transmigrasi dimana nama yang ada pada daftar penerima tidak sesuai bahkan orang tersebut tidak diketahui keberadaannya, tetapi lahan dan bangunannya ada hingga saat ini namun dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengolah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang evaluasi program transmigrasi di Kabupaten Merauke.

B. Rumusan Masalah

Perubahan besar yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia saat ini yaitu pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu wujud yang harus dilakukan adalah pemerataan penduduk sebagai upaya untuk pembangunan daerah, menekan angka kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam. Transmigrasi sangat penting karena dinilai mampu membuat perubahan besar dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Kesejahteraan masyarakat yang merata juga merupakan manfaat dari program transmigrasi, transmigrasi memang diarahkan untuk benar-benar menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan, bahkan transmigrasi lebih dipilih oleh masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki penghidupan yang layak.

Saat ini transmigrasi dipandang bahwa tidak hanya tentang perpindahan penduduk, melainkan juga sebagai program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program transmigrasi. Lokasi penelitian ini difokuskan pada daerah-daerah transmigrasi di Kabupaten Merauke tepatnya di Distrik Kurik.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana evaluasi program transmigrasi di Kabupaten Merauke?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari program transmigrasi terhadap masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Merauke. Dalam perkembangannya, transmigrasi di Papua secara khusus di Kabupaten Merauke telah membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat serta pembangunan daerah.
2. Untuk menjelaskan dampak dari program transmigrasi yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan evaluasi program transmigrasi di Kabupaten Merauke.
- b. Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya terutama yang berkenaan dengan evaluasi program transmigrasi di Kabupaten Merauke.

2) Manfaat Praktis

Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung program transmigrasi di Kabupaten Merauke.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati karena adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan padabagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewitt, dalam Thoha, 1998 : 251). Sementara Kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. (Tjokroamidjojo, 1993 : 92). Dye (dalam Islamy, 1997 :18) mengatakan bahwa kebijaksanaan negara sebagai "*is whatever government choose to do or do not to do*" (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektif). Kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua "tindakan" pemerintah.

Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “suatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah.

B. Pelaksanaan Program

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas, maka terlebih dahulu mendefinisikan Pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri (Leo Agustino, 2008:139)

Pengertian tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2011:618) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Dalam hierarki kebijakan, dikenal istilah program. Definisi yang dikemukakan oleh Wirawan (2012:17) yang mengemukakan bahwa program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.

Hubungan yang saling terkait dan kompleks diatas memang sangat mungkin terjadi dalam ranah implementasi kebijakan, sehingga penelitian implementasi kebijakan seharusnya tidak dilihat penelitian sederhana. Di dalam implementasi sebuah kebijakan ataupun program terdapat unsur-unsur yang berperan penting dalam implementasi, menurut Tachjan (2006) adalah ; 1) Unsur pelaksana; 2) Adanya program yang dilaksanakan; 3) Target group atau kelompok sasaran. Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan

kebijakan atau program tersebut yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Sasaran yang dikehendaki
 - 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
 - 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
 - 4) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- (Suratman 2017:33-34).

Program pada dasarnya merupakan operasional dari suatu kebijakan, sehingga program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian, dengan tujuan pemeratan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya untuk pengembangan wilayah, Upaya pengembangan

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan maka dalam hal ini erat kaitannya dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam Kamus Webster (dalam Wahab, 1997 : 64) secara implementatif kebijakan dapat dirumuskan : “to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Kalau pandangan itu diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden). Grindle (dalam Wahab, 1997 : 127) mengemukakan tentang proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana / biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran negara. Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Cleaves (Wahab, 1997:125) menyatakan, bahwa implementasi mencakup “*a process of moving toward a policy objective by mean of administrative and political steps*”. Keberhasilan atau kegagalan

implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan / mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.

C. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya merujuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan aspek hasil.

Aspek proses menunjuk bahwa apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan, kemudian dari aspek hasil merujuk apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Meskipun demikian kajian evaluasi yang lebih komprehensif sudah selayaknya dilakukan, yaitu mengevaluasi:

- a. Proses implementasi yang berlangsung telah dilakukan secara konsisten.
- b. Jika terjadi penyimpangan, apakah penyimpangan tersebut disebabkan oleh ketidakrealistisan kebijakan terhadap lapangan kebijakan atau atas inisiatif implementor?
- c. Mengapa implementor melakukan deskresi?
- d. Bagaimana hasil kebijakan akibat deskresi implementor?

- e. Bagaimana hasil kebijakan lain yang tidak mengalami penyimpangan?

Hal-hal diatas menarik untuk diungkap, untuk menentukan apakah kebijakan benar-benar memberikan implikasi terhadap kelompok sasaran. Desain evaluasi kebijakan kemudian dikembangkan untuk meyakinkan bahwa kebijakan benar-benar mengakibatkan *output dan outcome*.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun

erhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

William Dunn (1998: 608-609), mengatakan evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu :

1) Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan pra syarat bagi evaluasi.

4) Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil

di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

5) Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut Subarsono (2005:119), evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Leo, 2006:186). William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian nilai. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Dunn, 2003:608). Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran

kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Leo, 2006:186).

Untuk melihat keberhasilan suatu program, Dunn menetapkan beberapa kriteria diantaranya Efektivitas Kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.

1) Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arthur G. Gedeian, dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* mengartikan efektivitas; *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61). William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa: Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. (Dunn, 2003:429).

2) Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa: Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

3) Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapajauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan

dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4) Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5) Responsifitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasarankebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok kelompok masyarakat tertentu (Dunn,2003:437).

6) Keberhasilan

kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

7) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N.Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

D. Sejarah Program Transmigrasi

Transmigrasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yaitu perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dalam suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang”
H.J.Heeren (1979:6)

Adapun pendapat dari Everest S. Lee dalam Mantra (2003:180) mengemukakan bahwa :

“seseorang melakukan perpindahan baik migrasi maupun transmigrasi didasari oleh beberapa faktor yaitu 1) faktor di daerah asal, 2) faktor di daerah tujuan, 3) faktor penghalang 4) faktor individu.

Sejalan dengan makna filosofis yang melatarbelakangi, transmigrasi merupakan bentuk pembangunan yang demokratis dan menempatkan HAM sebagai landasan pelaksanaannya. Artinya, keikutsertaan masyarakat dalam program transmigrasi didasarkan pada prinsip sukarela dan dapat memilih jenis serta pola usaha yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masing-masing. Untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih, maka Mirwanto Manuwiyoto (2004: 41) membagi transmigrasi menjadi tiga jenis antara lain:

- a. Transmigrasi Umum (TU), yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah. Artinya, keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi (proses perpindahan, penyediaan ruang, dan pemberdayaan) menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan transmigran mendapat bantuan bila perlu mendapat subsidi dari Pemerintah.
- b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), yaitu transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Usaha. Peranan pemerintah adalah membantu dalam batas tertentu agar kemitrausahaan Badan Usaha dengan transmigran berjalan setara, adil dan berkesinambungan, agar kedua pihak saling memperoleh keuntungan.
- c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok, baik melalui kerjasama dengan Badan Usaha maupun sepenuhnya dikembangkan oleh transmigran yang bersangkutan.

Selanjutnya pada masa Orde Baru transmigrasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Transmigrasi Umum (TU), yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah (umumnya pola tanaman pangan di lahan kering dan di lahan basah).
- b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), yang sebagian dibiayai oleh pemerintah (umumnya untuk prasarana), dan sebagian lagi dibiayai oleh Pengusaha melalui Kredit Koprasia Para Anggota (KKPA).
- c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), yang dibiayai sepenuhnya oleh transmigran, sedangkan pemerintah menyediakan lahan seluas dua hektar/Kepala Keluarga.
- d. Transmigrasi Pola Agro Estate yang merupakan bentuk perkebunan yang dikelola secara agribisnis.

1. Sejarah dan Perkembangan Transmigrasi

Sejarah kemunculan transmigrasi dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dan memindahkan kelompok penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang ditempati sebelum melakukan kegiatan transmigrasi. Jauh sebelum pemerintah Indonesia mencanangkan program transmigrasi, pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menjajah Indonesia menggulirkan program serupa yang disebut kolonisasi. Latar belakang dari kolonisasi itu sendiri dikarenakan lahan pertanian di Pulau Jawa yang semakin menyusut.

Pada tahun 1905 pemerintah Belanda memulai transmigrasi dengan nama kolonisasi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang ada di pulau Jawa, kemudian pada tanggal 12 Desember

1950, Pemerintah Indonesia secara resmi melanjutkan program kolonisasi yang telah dirintis pemerintah Belanda dengan nama transmigrasi (Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Sekarang)

Dalam perkembangannya, transmigrasi melewati beberapa periode sebagai berikut, pada awal perkembangannya, mulai dari periode kolonisasi hingga pelita VI, orientasi transmigrasi berbeda-beda, pada periode pertama sebagai permulaan program transmigrasi, pemerintah mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa, lalu kemudian mengacu pada persebaran penduduk dan pada periode kedua pemerintah menetapkan pokok-pokok transmigrasi sebagai mana tertuang pada undang-undang No. 3 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi. Kemudian pada periode kedua orientasi pembangunan transmigrasi bukan hanya berfokus pada penyebaran penduduk tetapi sudah diprogramkan kearah pembangunan pada berbagai sektor dan pembangunan daerah.

Pada periode ketiga pemerintah bergeser dari aspek sosial ke aspek ekonomi, sehingga sektor transmigrasi dialihkan dari bidang sosial ke bidang ekonomi. Pada periode selanjutnya program transmigrasi berorientasi pada peningkatan mutu permukiman transmigrasi dan mengembangkan pola-pola usaha lain seperti tanaman pangan, Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, jasa industri, perikanan, dan peternakan. Pada periode kelima tidak banyak perubahan hanya lebih

kepada pengembangan pertanian namun peningkatannya lebih kepada pola perkebunan, perikanan dan HTI. Pada periode terakhir transmigrasi lebih diarahkan pada pembangunan daerah, memperbanyak penyebaran penduduk, dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Penyelenggaraan transmigrasi yang telah dilaksanakan sejak zamankolonisasi sampai sekarang telah membuka lapangan kerja, melahirkan ketahanan pangan, pemerataan persebaran penduduk dan pengembangan wilayah. Pembangunan transmigrasi sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayahnya masing-masing telah berkontribusi dalam pembangunan diantaranya dalam aspek kewilayahan seperti terbentuknya daerah-daerah otonom baru yaitu desa, kecamatan dan kabupaten, aspek pertanian (sesuai komoditas yang dikembangkan) dan aspek kependudukan (peningkatan jumlah sumberdaya manusia).

Pada Periode Reformasi, telah terjadi beberapa kali perubahan kabinet yang secara langsung berpengaruh terhadap orientasi dan paradigma transmigrasi. Sejak masa kabinet reformasi, terjadilah perubahan mendasar pada tataran politis yang kemudian berdampak pada program transmigrasi dalam pembangunan nasional. Transmigrasi diletakkan sebagai komponen pembangunan wilayah dalam pembangunan daerah. Kemudian dalam periode Kabinet Persatuan Nasional, transmigrasi telah melebur ke dalam konsep pembangunan sektoral dan desentralisasi.

Perubahan perpolitikan nasional dan bergulirnya reformasi, telah menjadi prakondisi bagi terjadinya pergeseran posisi transmigrasi dari program sektoral transmigrasi menjadi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi. Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, mendorong persebaran penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan baru, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk semata, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down*, melainkan berdasarkan Kerjasama antardaerah yaitu antara daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan yang lebih besar untuk menjadi transmigran dengan proporsi hingga 50%, bahkan dalam beberapa kasus terdapat permukiman transmigrasi lebih dari 50%.

Pada kurun waktu 2004-2009, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (*direct policy*) maupun tidak langsung (*indirect policy*). Adanya revitalisasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi

agar kawasan transmigrasi berkembang dan selanjutnya terbentuk pusat pertumbuhan.

Revitalisasi Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dalam program transmigrasi juga ada beberapa aspek penting diantaranya adalah :

- a. Aspek Kewilayahan hingga tahun 2013 penyelenggaraan transmigrasi selamini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam pembangunan nasional antara lain dari 104 Permukiman Transmigrasi (Kimtrans) telah berkembang menjadi ibu kota Kabupaten/Kota, 383 Permukiman Transmigrasi menjadi ibu kota Kecamatan dan dari sejumlah 3.055 permukiman yang dibangun sejumlah 1.183 permukiman transmigrasi menjadi desa definitif, dan 2 ibukota provinsi (Sulawesi Barat di Mamuju dan Bulungan di Kalimantan Utara) serta 44 Kota Terpadu Mandiri (KTM) tersebar diluar Jawa.

b. Aspek Pertanian dari aspek pertanian, kawasan transmigrasi telah menjadisentra produksi pangan, perkebunan dan agribisnis. Diberbagai daerah tujuan transmigrasi, baik di Sumatera, Kalimantan,Sulawesi, Maluku, dan Papua, kawasan transmigrasi menjadi sentra produksi pangan, perkebunan seperi sawit dan karet dan agribisnis. Di Sumatera, Belitang, Karang Agung, Mesujidan Rawa Pitu menjadi lumbung padi. Di Papua seperti TanahMiring, Kabupaten Merauke dan Arso, menjadi sentra penghasil padi dan perkebunan. Demikian pula sentra perkebunan sawit, seperi Sungai Bahar Jambi, Arga Makmur Bengkulu, Parenggean Kalimantan, berasal dari permukiman transmigrasi.

Pembangunan transmigrasi melibatkan pemerintah daerah, untuk mewujudkan suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang secara dinamis, produktif, maju dan mandiri. Untuk membangun suatu komunitas masyarkat yang memerlukan proses perencanaan yang melibatkan pihak terkait secara terintegrasi, menyeluruh dan terdiri atas tahapan yang jelas dengan memperhai kan aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, administrasi dan aspek politik. Dengan demikian maka penyelenggaraan transmigrasi merupakan suatu sistem yang saling terkait dan tergantung antara daerah pengirim dan daerah penerima program transmigrasi. Proses penyelenggaraan transmigrasi tersebut diharapkan dapat membangun daerah untuk mewujudkan tiga hal sekaligus, yaitu

kesejahteraan, pembangunan daerah dan integrasi masyarakat. (Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Masa Depan : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi R.I, 2015)

Tantangan transmigrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan daerah transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan tokoh masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status kepemilikan lahan.

Dasar hukum penyelenggaraan transmigrasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Disamping itu, landasan lainnya adalah Keputusan Menakertrans No Kep 293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi KTM di

Kawasan Transmigrasi. (Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia)

2. Transmigrasi Di Indonesia

Kebijaksanaan pemindahan penduduk yang dikenal dengan istilah kolonisasi oleh pemerintah Belanda bermaksud memperbaiki kemakmuran (meningkatkan kesejahteraan) rakyat di pulau Jawa (Purboadiwidjojo, 1985). Program yang ditujukan untuk pendidikan, irigasi dan emigrasi yang dapat memperbaiki keadaan sosial-ekonomi. Penyelenggaraan kolonisasi oleh pemerintah Belanda dianggap mahal, karena segala keperluan serta kolonis seperti biaya hidup, biaya perjalanan, jaminan hidup, alat-alat pertanian dan sebagainya ditanggung oleh pemerintah Hindia-Belanda. Sistem ini dikenal dengan nama sistem “cuma-cuma” yang berlaku dari tahun 1905 sampai dengan 1911. Oleh karena itu pelaksanaan transmigrasi (kolonisasi) membawa resiko (mempengaruhi anggaran belanja pemerintah) sehingga diadakan perubahan cara pembiayaan kolonisasi.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1969, pemerintah Indonesia meneruskan usaha perpindahan penduduk tersebut dengan nama transmigrasi. Kebijakan yang dilakukan pada waktuitu hampir sama dengan kolonisasi pada zaman pemerintah Belanda, serta masih pada pemikiran bahwa masalah kepadatan

penduduk di Jawa hanya dapat diatasi dengan memindahkan penduduk keluar Pulau Jawa.

Perubahan dan peningkatan strategi transmigrasi dari suatu program yang berorientasi pada demografi menuju suatu program yang berorientasi pada pembangunan daerah, terlihat pada kebijaksanaan transmigrasi dalam Pelita III yang menegaskan bahwa :

“transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi serta pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah, khususnya diluar Pulau Jawa yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup para transmigran dan taraf hidup masyarakat sekitarnya”

Penyebaran penduduk yang lebih merata melalui transmigrasi akan membantu dan merangsang peningkatan pembangunan daerah-daerah yang relatif kurang berkembang, sehingga persebaran penduduk akan menunjang usaha-usaha pembinaan menuju kehidupan yang lebih baik.

Penyelenggaraan transmigrasi berkaitan erat dengan bertolak dari berbagai persoalan yang bersifat lintas sektoral dan multi dimensional. Melihat berbagai kondisi dan hal-hal yang nyata terjadi di Indonesia, maka pemerintah menganalisis masalah-masalah penting yang kini dihadapi bangsa Indonesia, dalam hal ini yang berkaitan dengan upaya-upaya di bidang transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan inovasi dan pemikiran baru guna penyusunan strategi dan konsep

transmigrasi yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan perubahan dalam era reformasi. Isu-isu tersebut adalah :

- 1) Berlangsungnya ketimpangan persebaran penduduk antarpulau atau antarprovinsi berkenaan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- 2) Terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
- 3) Timbulnya krisis ketahanan pangan nasional yang dalam hal ini Indonesia telah menjadi pengimpor komoditas pangan.
- 4) Munculnya krisis sumber daya bahan bakar minyak sehingga diperlukan energi alternatif berupa bahan bakar nabati.
- 5) Telah dilaksanakannya keputusan politik tentang desentralisasi atau otonomi daerah.
- 6) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan.

Pola baru transmigrasi dalam era otonomi daerah dalam tataran operasional secara hierarkis mengacu pada tujuan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).

Dalam lingkup nasional harus dirumuskan bahwa program transmigrasi di era otonomi daerah diharapkan dapat memecahkan persoalan demografi dan memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, disamping itu program ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam mendistribusikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Dalam era otonomi daerah, ada beberapa pilar penting transmigrasi yaitu :

- a. Pilar ketahanan pangan nasional
- b. Basis baru ketahanan nasional
- c. Fundamental penyediaan energi alternatif
- d. Instrumen pemerataan investasi
- e. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

3. Transmigrasi Di Papua

Transmigrasi di Tanah Papua tak lepas dari sejarah penjajahan pemerintah kolonial Belanda terhadap koloni-koloninya. Bayangkan sejak 21 Februari 1902 pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke. Selanjutnya pada 1908 datang lagi masyarakat dari Jawa yang bermukim di Kuprik. Bersamaan dengan itu juga warga dari Pulau Rote menuju ke Merauke dan tinggal di Kampung Timor, Merauke.

Pemerintah Belanda mulai mendatangkan warga Jawa dan Timor ke Papua untuk berladang dan bersawah menyediakan sayur-sayuran dan beternak guna memenuhi kebutuhan para pemimpin Belanda di Papua New Guinea. Pada 1910, pemerintah Belanda kembali mendatangkan masyarakat Jawa dan memukimkan mereka di lokasi Spadem dan Mopah Lama. Ternyata program kolonisasi tak pernah berhenti, usai Perang Dunia Kedua program ini terus bergulir. Pada 1943, pemerintah Belanda mengadakan survey di areal sungai Digul dan Bian hingga ke daerah Muting. Pemerintah Belanda terus berupaya untuk mendatangkan orang-orang Jawa yang dimukimkan di Merauke.

Setelah program kolonisasi dari pemerintah kolonial Belanda usai, program ini tetap diteruskan pemerintah Indonesia dengan menggantikannya program transmigrasi di Papua. Program ini dimulai lima tahun sebelum pelaksanaan Pepera (1969) dengan mendatangkan kembali warga Jawa di Papua dengan nama Pelopor Pembangunan Serba Guna di Kabupaten Manokwari (12KK/30 jiwa); Kumbe Merauke (27 KK); di Dosai Kabupaten Jayapura (9KK). Model dan pola transmigrasi di Papua antara lain :

- a) Pola Tanaman Pangan : Sebagian besar (90 persen) Unit Pemukiman Transmigran(UPT) dapat digolongkan dalam pola tanaman pangan. Pada pola ini setiap KK memperoleh lahan pertanian seluas 2 Ha dengan perincian 0,25 hektar lahan pekarangan dan 0,75 lahan usaha I. Sedangkan lahan usaha II masih berupa hutan.
- b) Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans : Pola PIR yang telah dikembangkan adalah pola-pola PIR Kelapa Sawit di Arso sekarang Kabupaten Keerom sebanyak 5 UPT dan di Kabupaten Manokwari sebanyak 5 UPT. Setiap KK pola PIR memperoleh lahan seluas 3 Hektar yaitu 0,25 hektar sebagai lahan pekarangan, lahan pangan seluas 0,75 hektar dan lahan plasma seluas 2 hektar yang dikembangkan Kelapa Sawit.
- c) Pola Nelayan (Trans Nelayan) : Pola trans ini dikembangkan pada 1 UPT di Wimro Kecamatan Bintuni (sekarang Kabupaten Teluk Bintuni). Di Sorong telah disiapkan lahan seluas 10.000 hektar di Pulau Waigeo(Kabupaten Raja Ampat) untuk trans nelayan
- d) Pola Hutan Tanaman Industri (HTI-Trans): Pola ini dikembangkan adalah jenis komoditi varietas sagu unggul di Lokasi Aranday I dan Aranday II di Kabupaten Manokwari.

- e) Pola Jasa dan Industri(Trans-Jastri): Pola ini dikembangkan di Kabupaten Biak Numfor di lokasi UPT Moibaken. Industri yang dikembangkan di sana adalah pemanfaatan galian c dan industri dasar kayu meubel. Program ini gagal karena industri yang dikembangkan tak laku di pasaran. Terpaksa warga trans bertahan di lahan terbatas dan beralih menjadi petani. Sebagian trans pulang ke daerah asal.
- f) Pola Transmigrasi Agro Estate : Pola ini hampir mirip dengan pola transmigran PIR Trans yang dikembangkan di Arso dan di Warmare Manokwari.
- g) Pola Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika (Bhintuka) : Program ini hanya dikembangkan di Papua dan Aceh. Konsep transmigrasi Bhintuka ini terbuka untuk masyarakat dari seluruh suku bangsa di Indonesia. Lokasi baru dibuka di SP XIII Timika, Kabupaten Mimika pada 1998.
- h) Pola Pengembangan Kawasan Terpadu : Pola ini dikembangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pusat pertumbuhan baru dengan mengembangkan kota-kota di lokasi transmigrasi. Pengembangan kawasan terpadu dilakukan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Keerom.

Pertambahan penduduk di Papua lebih banyak dipengaruhi oleh proses migrasi masuk (*in migration*) yaitu migran spontan dan transmigran. Sedangkan pertambahan penduduk Papua secara alami (*natural increase*) yang disebabkan selisih penduduk yang lahir (*fertility rate*) dibanding yang meninggal (*mortality rate*) sangat kurang berperan. Apabila program transmigran tidak lagi dikembangkan seperti jaman era Orde Baru maka penambahan penduduk di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) lebih banyak dipengaruhi oleh migran spontan asal provinsi

lainnya di Indonesia (La Pona : Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih)

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Program tersebut diprioritaskan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara melalui pembangunan satuan permukiman baru, satuan permukiman, dan satuan permukiman tempatan dengan berbagai pola usaha yang dikembangkan. Upaya pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga terus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, hingga saat ini sudah terbentuk 23 kawasan transmigrasi. Lokasi tersebut diantaranya, Kawasan Salor di Kabupaten Merauke; Kawasan Kobisonta, di Kabupaten Maluku Tengah; Kawasan Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Bungku di Kabupaten Morowali; Kawasan Pawonsari di Kabupaten Boalemo, Kawasan Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Gerbang Kayong di Kabupaten Kayong Utara dan Kawasan Telang di

Kabupaten Banyuasin. Sebelum terbentuk menjadi kawasan transmigrasi, pemerintah telah menetapkan 48 Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi yakni, pertama, membuka keterisolasian daerah terpencil. Data mencatat, program transmigrasi telah berkontribusi pada pembangunan jalan poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M² di kawasan-kawasan transmigrasi di wilayah Indonesia.

Program transmigrasi telah mendorong pembentukan 2 ibukota provinsi baru. Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, yakni Bulungan, juga lahir dari pengembangan kawasan transmigrasi. Program ini juga telah mendorong pembentukan ibukota kabupaten/kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/kota. Selain itu, 385 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan.

Kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3.055 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183 telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah. Transmigrasi juga mendorong swasembada pangan dan upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan

usaha II) seluas 8.081.969 hektardan mendukung upaya ekspor non migas. Wujud nyata dari kontribusi tersebut yaitu melalui pembukaan lahan perkebunan seluas 391.559 hektar dan berkembangnya pusat produksi baru yang berbasis pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian besar lokasi tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan. (ditjenpktrans-kemendesa 2015)

Transmigrasi sebagai salah satu program kependudukan di Indonesia, dalam pelaksanaannya transmigrasi telah menunjukkan berbagai keberhasilan, baik dari sisi peningkatan kesejahteraan transmigran, penciptaan kesempatan kerja, maupun dari sisi pembangunan desa-desa baru ataupun pusat pertumbuhan. Di daerah asal, kontribusi pembangunan transmigrasi terutama dalam mengatasi keterbatasan peluang kerja dan berusaha maupun mendukung pembangunan beberapa infrastruktur strategis.

Dalam konteks transmigrasi sebagai program untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pemukiman transmigrasi selain diharapkan mampu untuk berkembang, juga diharapkan berdampak positif pada pengembangan wilayah sekitarnya. Jika perkembangan permukiman transmigrasi tidak terkait dengan wilayah sekitarnya, akan mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan dapat memicu ketidakpuasan antar wilayah serta membuka peluang munculnya ketidakstabilan politik daerah. Ketidakstabilan politik akan sangat merugikan daerah dalam

jangka menengah dan panjang. (Junaidi. forum diskusi perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi).

Secara umum pelaksanaan transmigrasi telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat berbagai stigma negatif yang melekat pada program transmigrasi. Diantaranya menurut Manuwiyoto (dalam Ernan Junaidi 2008) transmigrasi dicap sebagai program sentralistik, pemindahan kemiskinan, deforestasi, jawanisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terkait dengan stigma negatif ini, Siswono (2003) juga mengemukakan beberapa aspek yang menyebabkan terpuruknya citra program transmigrasi yang bermuara pada penolakan di beberapa daerah. Diantaranya adalah: (a) terlalu berpihaknya pemerintah kepada etnis pendatang (transmigran) dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di unit permukiman transmigrasi (UPT) dan kurang memperhatikan penduduk sekitar. Perbedaan ini, mengakibatkan perkembangan UPT relatif lebih cepat ketimbang desa-desa sekitarnya sehingga menimbulkan kecemburuan yang berdampak sangat rentan terhadap konflik; (b) Sistem pemberdayaan dan pembinaan masyarakat transmigrasi dilaksanakan dengan pendekatan sentralistik, yang mengakibatkan budaya lokal nyaris tidak berkembang, sementara budaya pendatang lebih mendominasi; (c) Proses perencanaan kawasan permukiman transmigrasi kurang dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar.

E. Dampak Perubahan Sosial Ekonomi

Teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori tentang dampak sosial dan ekonomi. Sebelum membahas dampak sosial, perubahan sosial sendiri diartikan oleh Wiryohandoyo (2002:1) sebagai suatu bentuk peradaban manusia akibat adanya perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Selain itu perubahan sosial yang terjadi menurut Kingslay Davis (dalam Djazifah, 2012:5) merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pendapat lain dinyatakan oleh Selo Soemardjan (dalam Wulansari, 2009:126) bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dari penjelasan tentang perubahan sosial, dapat dijelaskan pertama tentang dampak sosial menurut Surto Haryono (dalam Dwi, 2015:21), dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Sedangkan lebih jelasnya Douglas dkk (dalam Disbudpar Banten, 2013:28) menjelaskan tentang analisis kebijakan dengan beberapa indikator seperti, (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kolektif, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode serta, (5) struktur masyarakat. Sedangkan Fardani

(2012:6) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara ekonomi, dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes (dalam Disbudpar Banten, 2013 : 20) dikelompokkan dalam tiga indikator, (1) *direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) *indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan, (3) *induced effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan. Selain itu dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen (dalam Dwi, 2015 : 21) terdiri dari, (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan. Hal lain menurut Sinaga (dalam Setyaningsih, 2014: 6) dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian.

F. Penelitian Terdahulu

Evaluasi Dampak Program Transmigrasi Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Pola Pengeluaran Warga Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya Di Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara Oleh Patongai H. Sjamsuddin, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1987.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan warga transmigran sesudah di transmigrasikan dibandingkan sebelumnya. Survei yang dilakukan meliputi aspek lapangan pekerjaan, pendidikan, sarana dan prasarana, ekonomi, lingkungan dan aspek sosial.

Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat : Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya oleh Nova, STAI-YDI Lubuk Sikaping, Indonesia. 2016. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program transmigrasi ternyata telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat kecamatan Timpeh. Transmigrasi membentuk identitas baru sosial, budaya masyarakat serta pola pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Umami (2010) tentang “Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep “, dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa program migrasi berdampak pada ekonomi yang meliputi transformasi pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, serta pola konsumsi.

G. Kerangka Pikir

Wujud nyata dari program atau kebijakan publik terhadap masyarakat yaitu untuk kepentingan masyarakat. Salah satu kebijakan yang lahir adalah program transmigrasi dimana tujuan dari transmigrasi adalah untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya. Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan transmigran sebagai objek penyelenggaraan transmigrasi telah berkontribusi dalam pengembangan daerah

Program transmigrasi lahir setelah ditetapkannya Peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian).

Program transmigrasi mempunyai tujuan utama yaitu untuk Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Penyebab utama munculnya program transmigrasi yaitu pemerintah berkeinginan agar ada pemerataan penduduk pada setiap daerah dengan melihat potensi di daerah tujuan transmigrasi serta mempertimbangkan kesempatan, dalam hal ini adalah kesempatan kerja di daerah transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi berkaitan erat dengan bertolak dari berbagai persoalan yang bersifat lintas sektoral dan multi dimensional.

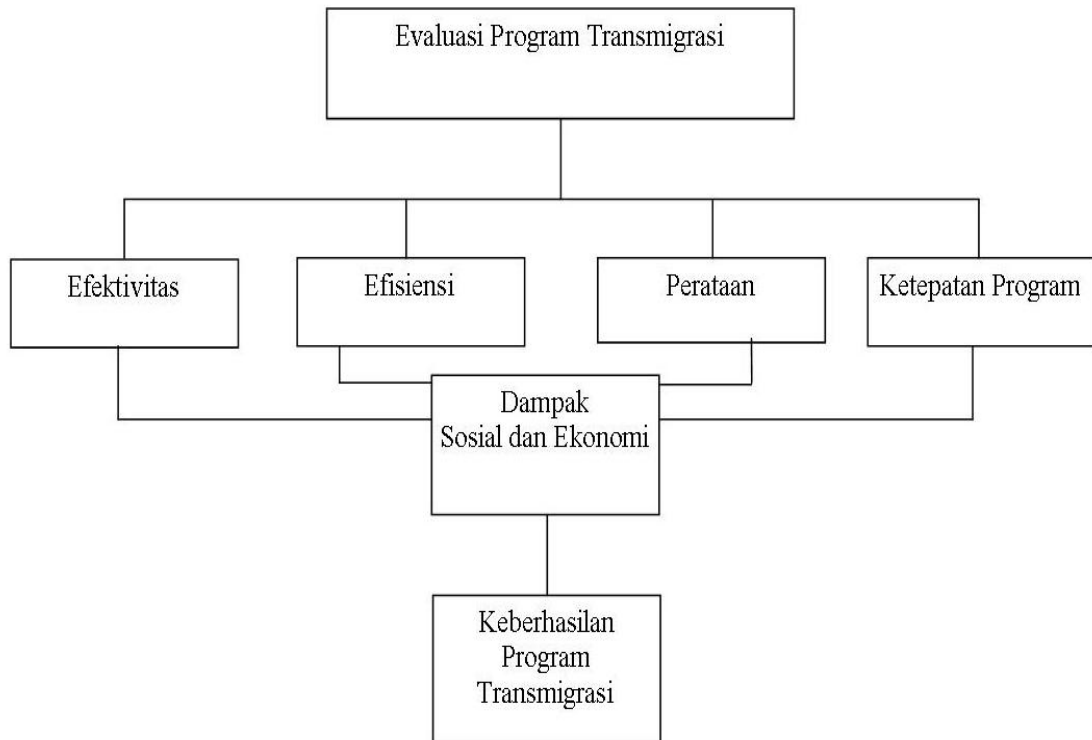
Melihat berbagai kondisi dan hal-hal yang nyata terjadi di Indonesia, maka pemerintah menganalisis masalah-masalah penting yang kini dihadapi bangsa Indonesia, dalam hal ini yang berkaitan dengan upaya-upaya di bidang transmigrasi.

William N. Dunn (Dunn, 2003:429) menetapkan beberapa kriteria dalam melihat keberhasilan suatu program atau kebijakan, diantaranya :

“Efektifitas Kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.”

Dalam kerangka pikir ini, penulis mengambil empat indikator yaitu efektivitas, efisiensi, perataan, dan ketepatan program. Sedangkan sasaran atau *target group* dari program ini adalah masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi itu sendiri. Saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan dan pembangunan daerah, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Sasaran program transmigrasi pada hakekatnya bertujuan untuk pemerataan persebaran penduduk yang lebih seimbang dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat transmigrasi maupun masyarakat lokal.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III

Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran serta penjelasan terperinci tentang evaluasi program transmigrasi, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas mengenai program transmigrasi di Kabupaten Merauke.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada daerah yang menjadi pusat transmigrasi yaitu Distrik Kurik, Distrik Semangga dan Distrik Muting dimana wilayah tersebut adalah wilayah para transmigran bermukim. Dari ketiga Distrik tersebut, peneliti mengambil beberapa sample kampung dari jumlah kampung yang ada, tentunya kampung tersebut adalah kampung para transmigran.

C. Informan

Informan penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan penunjang, informan utama pada penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung dengan transmigrasi, sedangkan informan penunjang adalah kepala kampung dimasing-masing lokasi penelitian, serta sebagai informan tambahan yaitu pegawai Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Merauke.

Untuk teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu dengan memilih informan yang dianggap representatif untuk memberikan informasi mengenai program transmigrasi di Kabupaten Merauke.

D. Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis akan mengumpulkan data berupa data primer yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data berbentuk kualitatif meliputi, keefektifan, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan program transmigrasi.

Untuk data sekunder, penulis mengumpulkan data berupa kondisi pemukiman masyarakat melalui dokumentasi, daerah pertanian dan perkebunan serta perkembangan daerah-daerah transmigrasi. Selain itu, penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang berkaitan dengan program transmigrasi dan mengambil referensi dari buku-buku, artikel dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian maupun lokasi penelitian.

E. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada evaluasi hasil penyelenggaraan program transmigrasi di Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai keefektifan program transmigrasi di kabupaten Merauke apakah berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya dan untuk menentukan apakah kebijakan benar-benar memberikan implikasi terhadap kelompok sasaran. Desain evaluasi kebijakan kemudian dikembangkan untuk meyakinkan bahwa kebijakan memberikan

dampak terhadap pembangunan, sosial, budaya dan ekonomi. Lalu dari sisi pemerataan program akan dibahas apakah program tersebut benar-benar merata terhadap seluruh masyarakat transmigran yang lebih utamanya adalah masyarakat lokal yang ada disekitar kawasan transmigrasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain (Sugiyono, 2009:89).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data yang dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2011:334).

a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan data, fokus, menyederhanakan, dan/atau mengubah data yang muncul di dalam tema, catatan tertulis, pedoman wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Kondensasi data akan membuat data yang di dapat menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi terus menerus pada setiap proyek yang berorientasi kualitatif, bahkan sebelum data sebenarnya dikumpulkan, kondensasi antisipatif data terjadi dimana peneliti memutuskan mana yang akan menjadi kerangka konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data yang mendekati untuk kemudian dipilih. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sejumlah informasi terkait program transmigrasi di Kabupaten Merauke, serta informasi lainnya yang menurut peneliti masih ada hubungannya dengan program transmigrasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan kelanjutan dari tahap reduksi data untuk lebih menyederhanakan dari semua data yang diperoleh dengan lebih memfokuskan pada inti permasalahan yang ingin dicapai terutama yang memiliki kaitan erat dengan evaluasi program transmigrasi di Kabupaten Merauke sehingga dapat memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai data serta informasi dari berbagai sumber terutama informan yang memberikan informasi mengenai program transmigrasi di Kabupaten Merauke.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Papua dimana secara geografis terletak antara 137° – 141° Bujur Timur dan 5° – 9° Lintang Selatan. Dengan luas mencapai hingga 46.791,63 km atau 14,67 persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia.

Kabupaten Merauke sebelumnya merupakan Kabupaten Induk di Propinsi Papua wilayah selatan. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi empat buah kabupaten yang otonom yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel. Sejak dipecah menjadi 4 kabupaten, Kabupaten Merauke kini memiliki 20 Distrik dan masih merupakan kabupaten terluas di Indonesia. Secara administratif 20 distrik tersebut yaitu Kimaam, Ilwayab, Tabonji, Waan, Okaba, Tubang, Tabonji, Ngguti, Kurik, Malind, Animha, Merauke, Semangga, Tanah Miring, Naukenjerai, Sota, Muting, Jagebob, Elikobel dan Ulilin, dimana Distrik Waan merupakan distrikyang terluas yaitu mencapai 5.416,84 km²

sedangkan Distrik Semangga adalah distrik yang terkecil dengan luas hanya mencapai 326,95 km² atau hanya 0,70 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Sementara luas perairan di Kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 km²

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Merauke memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel; Selatan – Laut Arafuru; Barat – Laut Arafuru; Timur - Negara Papua Nugini

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Merauke berada di ujung timur bagian selatan Negara Indonesia, berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini dan Australia

2. Profil Distrik Kurik Kabupaten Merauke

Distrik Kurik memiliki jumlah kampung sebanyak 13 kampung yaitu Kurik, Jaya Makmur, Harapan Makmur, Sumber Mulya, Kaliki, Ivimahad, Salor Indah, Telaga Sari, Sumber Rejeki, Candra Jaya, Wonorejo, Anumbob, dan Wapeko. Distrik Kurik terletak diantara 7⁰.60'–8⁰.30' lintang selatan dan 139⁰.80'–140⁰.40' bujur timur, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Distrik Animha, sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Malind, sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, dan sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Tanah Miring. Distrik Kurik mempunyai luas wilayah sebesar 635,21 km² dimana Kampung Ivimahad adalah kampung yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu 305,05 km² atau 48,02 persen, sedangkan kampung yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kampung Sumber Rejeki yaitu sebesar 6,28 km² atau 0,99

persen. Distrik Kurik terletak 0-6 m di atas permukaan laut, dengan beriklim tropis, dan suhu udara diantara 19⁰C –36⁰C, serta kelembaban udara Distrik Kurik adalah 42%.

Sebagian besar masyarakat Distrik Kurik merupakan petani padi. Di Distrik Kurik mempunyai 6.479 hektar lahan sawah non irigasi, dengan luas lahan kebun sebesar 545 hektar. Luas panen sawah 9.250 hektar. Luas panen palawija di Distrik Kurik yaitu luas panen jagung sebesar 35 hektar, luas panen kedelai sebesar 34 hektar, luas panen kacang tanah 11,5 hektar, luas panen kacang hijau sebesar 12,5 hektar, sedangkan luas panen ubi kayu sebesar 48 hektar. Luas panen sayur-sayuran di Distrik Kurik yaitu luas panen cabai sebesar 6,85 hektar, luas panen petsai sebesar 0,95 hektar. Luas tanaman perkebunan kelapa di Distrik Kurik sebesar 53,75 hektar, sedangkan luas produksi tanaman perkebunan kelapa sebesar 45,75 hektar.

a) Wilayah Administratif

Tahun 2016 Distrik Kurik memiliki 9 kampung dengan 33 RW dan 121 RT. Dari seluruh kampung tersebut, kampung yang memiliki jumlah RW dan RT terbanyak yaitu Kampung Harapan Makmur dengan jumlah masing-masing 5 RW dan 24 RT, sedangkan kampung yang memiliki jumlah RW dan RT paling sedikit yaitu Kampung Kaliki dengan jumlah masing-masing 2 RW dan 4 RT. Jumlah perangkat kampung pada tahun 2016 di Distrik Kurik sama dengan tahun lalu yaitu 54 orang, yang terdiri dari 9 orang kepala kampung, 9 orang sekretaris kampung dan 36 orang

kepala urusan. Setiap kampung memiliki satu Kades, satu Sekdes, dan empat Kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, dan Kaur Umum.

Tabel 1 Nama dan Status Pemerintahan Desa/Kampung di Distrik Kurik

No	Kampung	Status Pemerintahan
1.	Harapan Makmur	Kampung
2.	Kurik	Kampung
3.	Jaya Makmur	Kampung
4.	Sumber Makmur	Kampung
5.	Kaliki	Kampung
6.	Ivimahad	Kampung
7.	Telaga Sari	Kampung
8.	Salor Indah	Kampung
9.	Sumber Rejeki	Kampung
Jumlah	9 Kampung	

Sumber : Badan Pusat Statistik (Kurik Dalam Angka Tahun 2017)

b) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Distrik Kurik pada tahun 2016 berdasarkan proyeksi data Sensus Penduduk Bulan Mei tahun 2010 BPS Kabupaten Merauke berjumlah 14.878 jiwa. Penduduk laki-laki merupakan populasi terbesar yaitu 7.681 jiwa atau sebesar 51,63 %, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 7.197 jiwa atau 48,37 % dari seluruh penduduk di Distrik Kurik.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Distrik Kurik Dirinci Menurut
Kampung dan Jenis Kelamin**

No	Kampung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ration Jenis Kelamin
1.	Kurik	1.511	1.491	3.002	101,34
2.	Harapan Makmur	1.367	1.287	2.654	106,22
3.	Ivimahad	578	477	1.055	121,17
4.	Telaga Sari	801	775	1.576	103,35
5.	Salor Indah	1.103	1.020	2.123	108,14
6.	Sumber Rejeki	286	272	558	105,15
7.	Jaya Makmur	1.468	1.344	2.812	109,23
8.	Sumber Mulya	369	349	718	105,73
9.	Kaliki	198	182	380	108,79

Sumber : Proyeksi Penduduk, Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke (Distrik Kurik Dalam Angka 2017)

c) Sarana Dan Prasarana

Pada tahun 2016, jumlah sekolah di Distrik Kurik sebanyak 17 unit, dimana jumlah Sekolah Dasar sebanyak 12 unit, jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 4 unit, dan jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 unit.

Pembangunan bidang kesehatan yang terus ditingkatkan merupakan salah satu usaha untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah Puskesmas pada Distrik Kurik sebanyak 1 unit yang berada di Kampung Kurik, jumlah puskesmas pembantu sebanyak 8 unit, jumlah posyandu sebanyak 14 unit, sedangkan jumlah balai pengobatan sebanyak 1 unit. Puskesmas Kurik memiliki 3 orang dokter, yaitu dokter umum sebanyak 2 orang dan dokter gigi sebanyak 1 orang. Jumlah tenaga

medis pada tahun 2016 sebanyak 28 orang, dimana jumlah perawat sebanyak 12 orang, bidan 16 orang, dan tenaga non paramedis sebanyak 4 orang. Selain itu ada juga asisten apoteker yang bertugas di Puskesmas Kurik sebanyak 1 orang, dan kader posyandu yang tersebar di Distrik Kurik sebanyak 82 orang.

Distrik Kurik memiliki 81 unit tempat peribadatan yang dapat dipergunakan penduduk setempat. Jumlah Masjid sebanyak 11 unit, jumlah Mushola sebanyak 54 unit, jumlah Gereja Protestan sebanyak 8 unit, dan jumlah Gereja Khatolik sebanyak 8 unit.

3. Profil Distrik Semangga Kabupaten Merauke

Distrik Semangga berada di pantai selatan Kabupaten Merauke dengan luas wilayah 326,95 km² dengan luas perairan sebesar 92,07 km² dan terletak antara 140° 10'– 140° 40' bujur timur dan 8° 10'-80 40' lintang selatan. Distrik Semangga merupakan pemekaran dari Distrik Merauke. Distrik Semangga terdiri dari 10 kampung yaitu Kampung Urumb, Kampung Wanningap Nanggo, Kampung Matara, Kampung Muram Sari, Kampung Semangga Jaya, Kampung Sidomulyo, Kampung Kuprik, Kampung Kuper, Kampung Marga Mulya dan Kampung Wanningap Kai.

Terdapat dua kampung di Distrik Semangga yang berada di dalam kawasan hutan yaitu Kampung Muram Sari dan Kampung Wanningap Kai. Kampung Matara merupakan Kampung yang memiliki jarak tempuh terjauh

baik ke kantor Distrik Semangga maupun ke Kantor Distrik Kabupaten Merauke.

a) Wilayah Administratif

Tahun 2016 Distrik Semangga memiliki 10 kampung dengan 33 RW dan 98 RT. Kampung–Kampung di Distrik Semangga memiliki jumlah RW dan RT yang berbeda, beberapa kampung di Distrik Semangga terdapat kampung yang memiliki jumlah RW dan RT terbanyak dan juga terkecil. Kampung Marga Mulia memiliki jumlah RW terbanyak yaitu 7 RW sedangkan Kampung Sidomulyo memiliki jumlah RW terkecil yaitu 1 RW. Jumlah perangkat Kampung pada tahun 2016 di Distrik Semangga adalah 58 orang, yang terdiri dari 5 orang kepala kampung, 10 orang sekretaris kampung dan 40 orang kepala urusan.

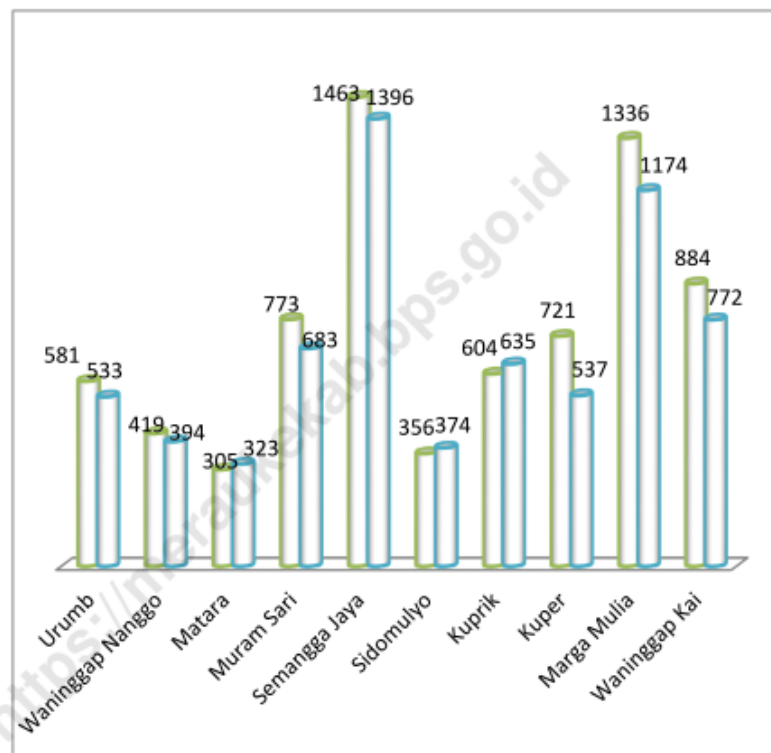
Tabel 3 Nama dan Status Pemerintahan Desa/Kampung di Distrik Semangga

No	Kampung	Status Pemerintahan
1.	Urumb	Kampung
2.	Wanningap Naggo	Kampung
3.	Matara	Kampung
4.	Muram Sari	Kampung
5.	Semangga Jaya	Kampung
6.	Sidomulyo	Kampung
7.	Kuprik	Kampung
8.	kuper	Kampung
9.	Marga Mulya	Kampung
10.	Wanningap Kai	kampung
Jumlah	10 Kampung	

b) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Distrik Semangga pada tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke berjumlah 14.263 jiwa, dilihat dari data tahun 2015 penduduk di Distrik Semangga mengalami peningkatan sebesar 1,49 persen.

Penduduk laki-laki merupakan populasi terbesar yaitu 7.442 jiwa atau sebesar 52,17 persen, sedangkan penduduk perempuan merupakan populasi terkecil yaitu berjumlah 6.821 jiwa atau 47,82 persen dari seluruh penduduk di Distrik Semangga. Dengan luas wilayah 326,95 km². berarti kepadatan penduduk di Distrik Semangga sebesar 43,62 jiwa/km².



Sumber : Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke (Distrik Semangga Dalam Angka 2017)

c) Sarana Dan Prasarana

Penyediaan sarana fisik pendidikan berupa tenaga guru, jumlah sekolah, dan fasilitas sekolah yang memadai merupakan hal yang penting yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi penduduk usia sekolah terhadap pendidikan. Pada tahun 2016, jumlah sekolah menurut Dinas Pendidikan dan Pengajaran, di Distrik Semangga sebanyak 15 unit, dimana jumlah SD sebanyak 11 unit yang terdiri dari 7 SD negeri dan 4 SD swasta, untuk jumlah SLTP di Distrik Semangga terdapat 3 unit, dan untuk jumlah SLTA sebanyak 1 unit yang terdapat di Kampung Urumb.

Jumlah SD sebanyak 1.812 orang yang terdiri dari 1.356 orang siswa/siswi negeri dan siswa/siswi swasta, jumlah murid SLTP sebanyak 677 orang, dan jumlah murid SMA negeri ada sebanyak 53 orang. Sedangkan jumlah guru di SD 88 orang, SMP 50 orang, dan SMA 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah murid di tahun 2016 untuk murid SD negeri mengalami penurunan di bandingkan tahun 2015.

Pada tahun 2016 jumlah pemeluk agama di Distrik Semangga menurut kantor agama sebanyak 18.448 orang menurun bila di bandingkan dengan tahun 2015. Untuk jumlah pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 1.433 orang, jumlah pemeluk agama Katholik sebanyak 3.465 orang dan mengalami penurunan di bandingkan pada tahun 2015 sebanyak 5.781, jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 13.455 orang ini mengalami kenaikan di bandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 12.305, dan jumlah pemeluk agama Hindu sebanyak 90

orang yang juga menurun dibandingkan dengan jumlah di tahun 2015. Jumlah pemeluk agama Budha terdapat 5 orang di Distrik Semangga. Distrik Semangga memiliki 45 unit tempat peribadatan yang dapat dipergunakan penduduk setempat. Jumlah Gereja Protestan sebanyak 5 unit, jumlah Gereja Katholik sebanyak 21 unit, jumlah Masjid sebanyak 18 unit, dan jumlah Pura sebanyak 1 unit .

4. Profil Distrik Muting Kabupaten Merauke

Distrik Muting termasuk wilayah geografis Kabupaten Merauke, yang merupakan bagian dari wilayah bagian selatan Provinsi Papua. Distrik Muting memiliki luas 3.868,08 km² yang terbagi menjadi 12 kampung yaitu Afkab Makmur, Wan Wai Bob, Selauw, Waan, Andaito, Pachas, Sigabel Jaya, Muting, Seed Agung Prasasti, Elanggol Jaya, Kolam dan Boha.

Kampung Paschas memiliki wilayah terluas yaitu 1.342,64 km², sedangkan Kampung Seed Agung Prasasti memiliki luas wilayah terkecil yaitu 24,52 km². Jarak tempuh dari tiap kampung ke kantor distrik memiliki jarak yang berbeda-beda. Jarak tempuh paling jauh adalah Kampung Selauw yaitu 52 km sedangkan yang paling dekat adalah Kampung Sigabel Jaya yaitu 9 km. Sementara untuk jarak tempuh distrik Muting ke kota Merauke sejauh 203 KM dengan kondisi jalan rusak sedang.

a) Wilayah Administratif

Distrik Muting terdiri atas 12 kampung yang terbagi ke dalam 22 RW dan 49 RT. Kampung yang memiliki jumlah RW dan RT terbanyak

adalah kampung Seed Agung Prasasti. Kampung Sed Agung Prasasti terdiri dari 4 RW dan 9 RT. Distrik Muting dipimpin oleh seorang kepala distrik dan masing-masing kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang dibantu oleh sekretaris kampung dan beberapa kepala urusan. Pada tahun 2016 terdapat 12 kepala kampung, 12 sekretaris kampung, dan 48 kepala urusan di Distrik Muting.

b) Sarana Dan Prasarana

Penyediaan sarana fisik pendidikan berupa tenaga guru, jumlah sekolah, dan fasilitas sekolah yang memadai merupakan hal yang penting yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi penduduk usia sekolah terhadap pendidikan. Pada tahun 2016, jumlah sekolah di Distrik Muting sebanyak 15 unit yang terdiri dari 12 unit Sekolah Dasar, 2 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pembangunan bidang kesehatan yang terus ditingkatkan merupakan salah satu usaha untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah puskesmas pada Distrik Muting sebanyak 1 unit yang berada di Kampung Muting, jumlah puskesmas pembantu sebanyak 11 unit, dan jumlah posyandu sebanyak 12 unit. Distrik Muting memiliki 29 unit tempat peribadatan yang dapat dipergunakan, penduduk setempat yang terdiri dari masjid sebanyak 7 unit, gereja Protestan sebanyak 8 unit, dan gereja Katolik 14 unit.

c) Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2016, penduduk Distrik Muting berjumlah 5.624 Jiwa dengan komposisi 2.889 jiwa laki-laki dan 2.735 jiwa perempuan. Dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini dapat diketahui besar rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2016, angka rasio jenis kelamin penduduk Distrik Muting sebesar 105,63. Artinya terdapat 106 laki-laki per 100 perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk Distrik Muting berada pada kelompok umur muda. Hal ini menunjukkan angka kelahiran di Distrik Muting cukup tinggi.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Evaluasi kebijakan adalah tahap dimana penilaian sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan guna menilai keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Anderson: 1975).

Kebijakan publik dapat terasa manfaatnya apabila kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Kebijakan merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah program transmigrasi, program transmigrasi sendiri dibuat oleh pemerintah guna mensejahterakan masyarakat, transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. Pertama, meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). Kedua, membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi), dan ketiga, mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.¹⁾ Esensi dari ketiga sasaran tersebut diharapkan dapat membangun komunitas masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya wilayah dan pengarahan perpindahan penduduk. (Pasal 4 UU no. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian)

Program transmigrasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Masyarakat yang ikut dalam program transmigrasi ini terlebih dahulu

diseleksi dan diberikan pembekalan serta pembinaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1999 Pasal 48 Bab VIII.

Sejauh ini program transmigrasi telah memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat maupun pembangunan di beberapa wilayah transmigrasi.

Hal ini nampak pada hasil wawancara dengan informan WR berikut:

"....menurut saya, program transmigrasi ini sangatlah membantu kami para warga trans untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup, apalagi di daerah kurik ini rata-rata masyarakatnya memiliki keahlian dalam bidang pertanian dan memang di distrik kurik ini memiliki keunggulan dalam bidang pertanian..."(wawancara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2018 pukul 11.42)

Keberhasilan program transmigrasi dapat dilihat pada masa sekarang dimana program transmigrasi selain bertujuan untuk pengembangan daerah dan pembangunan, program transmigrasi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomiannya.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari informan ST berikut :

"...dalam peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat melalui program transmigrasi ini perlu diacungi jempol karena lebih berhasil, contohnya saja sekarang ini Kabupaten Merauke dijadikan lumbung pangan, kita lihat saja sekarang ini daerah trans di Kurik semua rata-rata masyarakatnya memiliki rumah semi-permanen, yang dulunya pakai sepeda sekarang sudah memiliki 2 hingga 3 motor dalam 1 keluarga, bahkan mobil..."
(wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 10.17)

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan AL berikut :

“...untuk saat ini memang program trans ini berhasil, melihat mayoritas warga yang dulunya penduduk asli trans sekarang ini kehidupan mereka tidak seperti dulu sewaktu awal datang yang belum memiliki apa-apa, tapi sekarang ini bisa kita lihat sendiri mereka mempunyai rumah permanen, perkebunan karet dll...”(wawancara pada tanggal 15 Mei)

Program transmigrasi dinilai telah berhasil dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat serta pembangunan daerah. Jutaan potensi sumberdaya alam telah berhasil digali dan dikembangkan, ada sekitar 3.500 desa baru yang tumbuh dan tentu saja ada pula perkembangan infrastrukturnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Sensus Pertanian tahun 2016) produksi padi terbesar untuk Kabupaten Merauke adalah Distrik Kurik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Merauke 2016

No	Kecamatan	Luas Tanam	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Kimaam	215,00	215,00	645,00	3,00
2	Tabonji	130,00	130,00	390,00	3,00
3	Waan	106,00	106,00	318,00	3,00
4	Ilwayab	25,00	25,00	0,00	0,00
5	Okaba	88,30	88,30	264,90	3,00
6	Tubang	40,00	40,00	112,00	2,80
7	Ngguti	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kaptel	20,00	20,00	56,00	2,80
9	Kurik	11.752,00	11.705,00	49.161,00	4,20
10	Animha	58,00	58,00	174,00	3,00

11	Malind	6.166,25	6.108,75	25.656,75	4,20
12	Merauke	1.293,50	1.294,00	6.211,20	4,80
13	Naukenjerai	550,00	550,00	1.650,00	3,00
14	Semangga	8.022,00	7.986,00	38.332,80	4,80
15	Tanah Miring	14.148,00	13.587,00	16.141,50	4,50
16	Jagebob	1.053,50	1.053,50	4.214,00	4,00
17	Sota	19,25	16,25	55,09	3,39
18	Muting	62,00	62,00	167,40	2,70
19	Elikobel	378,50	378,50	1.156,32	3,06
20	Ulilin	247,00	247,00	790,40	3,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Merauke (Sensus Pertanian 2016)

Transmigrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan daerah transmigrasi, serta pemerataan perekonomian.

Peneliti menemukan bahwa keberhasilan satuan pemukiman transmigrasi pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi geografis daerah tersebut, misalnya daerah transmigrasi di Distrik Kurik dan semangga yang sektor pertaniannya berkembang pesat, hal tersebut dikarenakan kontur tanahnya yang bagus sehingga dalam satu tahun bisa memanen padi dua hingga tiga kali. Berbeda dengan daerah Muting yang kurang cocok ditanami tanaman

pangan seperti padi, di Muting lebih cocok dengan tumbuhan hortikultura dan perkebunan seperti sawit, karet, pala, serta buah-buahan, namun disisi lain, dengan terbukanya lahan dari warga transmigrasi, muncullah beberapa perusahaan pengolah kelapa sawit dan perusahaan karet dimana hasil perkebunan tersebut didapat dari para penduduk setempat yang notabene adalah warga transmigrasi.

Evaluasi kebijakan adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya merujuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan aspek hasil.

Aspek proses menunjuk bahwa apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan, kemudian dari aspek hasil merujuk apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (*ouput dan outcomes*).

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

a. Efektivitas

Efektifitas kebijakan merupakan suatu ukuran dalam proses kebijakan publik dimana kebijakan akan diukur dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan sebuah kebijakan. Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektifitas.

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Dunn, 2003:429). Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Program transmigrasi dinilai telah banyak memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat seperti yang dirasakan oleh para transmigran. Mereka pada umumnya berasal dari golongan masyarakat yang perekonomiannya rendah, setelah mengikuti program transmigrasi ini mereka dapat memenuhi kebutuhannya.

Hal ini nampak pada wawancara dengan informan SH berikut:

"....iya dulu sebelum saya kesini (Merauke) kehidupan saya bersama keluarga itu pas-pasan, lalu saya dapat informasi katanya ada transmigrasi, dari situ saya ikut dan allhamdulillah ya seperti

sekarang ini, penghasilan saya dari panen padi setiap tahunnya lumayan untuk sehari-hari bahkan lebih dari cukup...”
(wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 14.00)

Program transmigrasi sangat besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mereka terbantu dengan adanya program tersebut, selain itu program transmigrasi juga membuka lapangan pekerjaan, pusat perekonomian dan juga wilayah administratif baru dimana wilayah tersebut kini berkembang dengan pesat yang ditunjang sarana dan prasarana, namun disisi lain ada juga daerah transmigrasi yang masih akses jalannya masih sulit seperti Kampung Sigabel Jaya yang terletak di Distrik Muting, dengan jarak tempuh yang sangat jauh dari pusat kota membuat masyarakat kesulitan untuk menjual hasil-hasil perkebunannya selain pada perusahaan yang ada di daerah tersebut.

Hal ini nampak pada wawancara dengan informan AN berikut :

“...tidak semua masyarakat disini (kampung Sigabel Jaya) berhasil karena trans, sebagian dari mereka bekerja pada perusahaan sawit dan karet yang ada disini, tapi memang mereka warga asli transmigrasi yang dulunya datang dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur...”

(wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 13.25)

Tetapi informan AL mengatakan hal berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya :

“...dulu pada tahun-tahun awal masa transmigrasi banyak warga trans yang keluar dari kampung ini menuju ke berbagai daerah, ada yang ke Merauke, Boven Digoel, dan Tanah Miring, mereka menganggap tidak ada perkembangan, namun setelah beberapa tahun kemudian mereka kembali lagi setelah melihat dan menyadari manfaat dari program transmigrasi ini dan akhirnya bisa kita lihat sekarang ini...”

(wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 15.00)

Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program transmigrasi ini, diantaranya adalah letak lokasi yang sangat jauh dan juga kondisi geografisnya karena tidak semua wilayah trans memiliki kondisi geografis yang baik, itulah sebabnya di setiap wilayah transmigrasi memiliki perkembangan yang berbeda-beda.

Fenomena terhambatnya logistik di beberapa distrik di Kabupaten Merauke terjadi pada jalan yang menghubungkan distrik di bagian timur Kabupaten Merauke seperti kondisi jalan Distrik Naukenjerai, Distrik Ulilin, Distrik Muting memiliki kondisi jalan yang sangat parah apabila hujan turun. Kondisi jalan licin dan berlumpur yang menyebabkan jalan tersebut hanya bisa dilewati oleh mobil *double garden* (4WD). Jika musim hujan hujan datang, transportasi akan terhambat. Misalnya Damri yang biasa beroperasi dari Merauke ke Bupul yang ditunjukkan oleh gambar 18 di bawah ini, akan sangat terhambat jika kondisi jalan tidak membaik (kering).

Gambar 2 ruas jalan salah satu kawasan transmigrasi



Gambar 3 Kondisi Jalanan salah satu kawasan transmigrasi



Sumber : Dokumentasi pribadi

a. Ruas Jalan Kuprik - Semangga

Ruas jalan Kuprik - Semangga sesuai gambar 4 yaitu terdiri dari 3 Kampung yaitu Kuprik, Kuper dan Sidomulyo. Ruas jalan Kuprik - Semangga menghubungkan Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring dan Distrik Kurik. Jenis permukaan ruas utama jalan kuprik adalah aspal. Akan tetapi masih ada kondisi jalan yang dalam kategori rusak sedang di beberapa ruas jalan

Gambar 4 Ruas Jalan Kuprik - Semangga, Kampung Kuper



b. Ruas Jalan Wendu - Kumbe

Ruas jalan Wendu - Kumbe sesuai gambar 5 yaitu terdiri dari 3 Kampung yaitu Urumb, Waninggap Nanggo, dan Matara. Ruas jalan Wendu - Kumbe menghubungkan Distrik Semangga, dan Distrik Tanah Miring. Jenis permukaan ruas utama jalan wendu adalah aspal dan tanah. Ruas jalan Wendu - Kumbeyang beraspal terdapat kondisi jalan yang dalam kategori rusak berat akibat abrasi pantai di Kampung Matara sehingga ruas jalan Wendu - Kumbe putus untuk ke Distrik kurik. Sedangkan untuk ke Distrik Semangga jenis permukaannya yaitu jalan tanah dan bersemak pada Kampung Wendu.

Gambar 5 Ruas Jalan Wendu - Kumbe, Kampung Matara (Sumber : Dokumentasi Pribadi)



c. Ruas Jalan Semangga – Tanah Miring

Ruas jalan Semangga – Tanah Miring sesuai gambar 6 yaitu terdiri dari 4 Kampung yaitu Marga Mulya, Semangga Jaya, Muram Sari dan Waninggap Kai. Ruas jalan Semangga – Tanah Miring menghubungkan Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring dan Distrik Kurik. Jenis permukaan ruas utama jalan semangga didominasi oleh jalan beraspal dan sedikit jalan tanah. Ruas jalan Semangga – Tanah Miring yang beraspal terdapat kondisi jalan yang dalam kategori sedang, rusak dan rusak berat. Kerusakan ini terdapat pada seluruh kampung yang dilalui ruas jalan Semangga – Tanah Miring. Sedangkan kondisi jalan tanah dalam kategori rusak terdapat pada kampung Waninggap Kai dan kampung Muram Sari

Gambar 6 Ruas Jalan Semangga – Tanah Miring, Kampung Semangga (Sumber : Dokumentasi Pribadi)



d. Ruas Jalan Tanah Miring - Salor

Ruas jalan Tanah Miring - Salor sesuai gambar 7 yaitu terdiri dari 7 Kampung yaitu Yasa Mulya, Waninggap Say, Hidup Baru, Waninggap Miraf, Amun Kay, Isano Mbias dan Yaba Maru. Ruas jalan Tanah Miring–Salor menghubungkan Distrik Tanah Miring dan Distrik Kurik. Jenis permukaan ruas utama jalan Tanah Miring adalah jalan beraspal. Akan tetapi masih ada kondisi jalan yang dalam kategori sedang, rusak dan rusak berat. Jalan dengan kategori sedang dan rusak terdapat pada kampung Yasa Mulya sedangkan jalan dengan kategori rusak berat terdapat pada kampung Isano Mbias dan Waninggap Miraf

e. Ruas Jalan Salor - Kurik

Ruas jalan Salor - Kurik sesuai gambar 8 yaitu terdiri dari 1 Kampung yaitu Salor indah. Ruas jalan Salor – Kumbe menghubungkan Distrik Kurik. Jenis permukaan ruas utama jalan Tanah Miring didominasi jalan tanah. Ruas jalan Salor – Kumbe masih terdapat kondisi jalan yang dalam kategori rusak.

Gambar 7 Ruas Jalan Tanah Miring - Salor, Kampung Wanningap Miraf



Gambar 8 Ruas Jalan Salor - Kurik, Kampung Salor (Sumber: Dokumentasi Pribadi)



f. Ruas Jalan Kurik - Kumbe

Ruas jalan Kurik - Kumbe sesuai gambar 9 yaitu terdiri dari 2 Kampung yaitu Harapan Makmur dan Kurik. Ruas jalan Kurik – Kumbe adalah ruas terjauh dalam bagan ruas jalan Analisis Hirarki Proses pada kasus ini. Jenis permukaan ruas utama jalan kurik didominasi permukaan jalan beraspal dan sebagiannya lagi adalah tanah. Ruas jalan kurik masih terdapat kondisi rusak sedang.

Gambar 9 Ruas Jalan Kurik - Kumbe, Kampung Harapan Makmur dan Kampung Kurik (Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Dari pengamatan peneliti bahwa lokasi transmigrasi yang cukup berhasil adalah Distrik Kurik dengan keunggulan dalam bidang pertaniannya yang semuanya dikelola oleh masyarakat transmigran. Dengan demikian pendapatan masyarakatnya pun meningkat.

Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan informan WR berikut :

“...beruntungnya kami, Distrik Kurik ini termasuk kawasan transmigrasi yang memang lahannya atau tanahnya sangat cocok untuk pertanian berbeda dengan wilayah lainnya seperti di Muting hanya hanya cocok untuk perkebunan saja sehingga hasil tanaman pangannya sangat kurang, tetapi untuk penghasil tanaman keras seperti buah-buahan, palawija, sawit dan karet disana sangat cocok, itulah sebabnya Distrik Kurik bisa panen dua sampai tiga kali dalam satu tahun dan itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakatnya juga...”

(wawancara dilakukan kembali pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 13.45)

Berbeda dengan Distrik Kurik, Distrik Muting tidak cocok untuk ditanami tanaman pangan, itulah sebabnya perkembangan perekonomian masyarakatnya terbilang lambat namun mereka dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang lainnya untuk keberlangsungan hidup, namun jika dilihat masyarakat trans yang ada di Distrik Muting juga memiliki tingkat perekonomian yang baik, sebagian dari mereka banyak yang berwirausaha dan sebagian lagi bekerja di perusahaan karet dan sawit.

Hal ini nampak pada hasil wawancara AN berikut

“...sebenarnya dulu program trans di kampung saya ini tidak begitu terlihat pengaruhnya, kami justru terbantu juga dengan adanya perusahaan yang ada disini, perusahaan itu ada karena adanya pembukaan lahan yang dulu dilakukan sewaktu program trans

dilaksanakan tetapi belum ada perusahaan yang masuk, baru pada tahun 2006 perusahaan masuk, mulai dari situ orang trans bekerjasama untuk hasil panennya dengan perusahaan, jadi dari situlah mereka menjadi seperti ini...”
(wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018)

Transmigrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan daerah transmigrasi, serta pemerataan perekonomian.

Secara umum program transmigrasi di Kabupaten Merauke telah berhasil dan efektif untuk membangun perekonomian masyarakat, kerjasama lintas sektoralpun sangat berpengaruh dalam kemajuan dan pembangunan suatu daerah yang dimulai dari desa, seperti salah satunya adalah program transmigrasi ini yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Merauke.

b. Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi,

adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Program transmigrasi berupaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna keberhasilan program itu sendiri, mulai dari sumber daya manusia hingga sumber daya alamnya. Karena sebab itulah program transmigrasi ini ditujukan pada Provinsi Irian Jaya (Papua) yang memiliki lahan seluas 414.800 KM², dengan lahan seluas itu dan masih kurangnya pengelolaan lahan maka pemerintah mendatangkan warga trans guna mengolah lahan.

Hal ini nampak pada hasil wawancara dengan informan SA berikut:

“...program transmigrasi ini tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan pekerjaan, menanggulangi kepadatan penduduk, tetapi juga untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada guna keberhasilan program itu sendiri, seperti di Papua ini, kita memiliki luas wilayah yang cukup, lahan pertanian maupun perkebunan yang luas, tetapi kita kekurangan tenaga dan alat untuk mengelolanya, oleh sebab itu pemerintah mendatangkan para transmigran untuk mengelola dan bekerjasama dengan masyarakat lokal untuk membangun daerahnya.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Juni 2018 pukul 10.00)

Pembukaan areal dengan luas wilayah kurang lebih 96.340 Ha terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha, serta areal perkebunan seluas 59.840 Ha dengan luas lahan potensial seluas 34.141 ha. Sementara untuk lahan yang telah yang telah dimanfaatkan untuk persawahan seluas 25.208 ha.

Sementara itu, pembangu89nan fisik permukiman transmigrasi yang telah dilakukan di Kabupaten Merauke terdiri dari :

Tabel 5 Pembangunan sarana dan prasana daerah transmigrasi

No	Jenis Pembangunan	(Ha/Km)
1	Pembukaan areal pemukiman dan lahan usaha	19.389 Ha
2	Jalan penghubung/jalan poros	290 Km
3	Peningkatan jalan <i>Soille</i> semen	20 Km
4	Rencana Peningkatan jalan <i>Soille</i> semen	16,5 Km
5	Pembangunan jalan desa	500 Km
6	Pembangunan jembatan rangka baja	287,5 Km
7	Pembangunan jembatan kayu	2.462 M
8	Saluran <i>Drainase</i>	251 Km

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Merauke



Gambar 10 Jembatan penghubung Kota Merauke dengan Distrik Semangga, Kurik, Tanah miring

Selain itu, untuk memperluas lahan pemerintah mereklamasi rawa-rawa yang ada di Distrik Kurik, Salor dan Kumbe untuk dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan dan juga areal pemukiman warga.

No	Daerah Reklamasi	Luas
1	Distrik Kurik	7.000 Ha
2	Salor	4.000 Ha
3	Kumbe	4.000 Ha

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Merauke



Gambar 11 Lokasi pemukiman warga dan areal pertanian

Pembangunan Sarana dan Prasarana jalanan darat di Kabupaten Merauke yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang mencapai 565 Km dari Kabupaten Merauke-Boven Digoel-Mindiptana-Waropko yang kini dilanjutkan ke Jayapura. Pembangunan jembatan rangka baja sepanjang 560 M diatas sungai Maro, jembatan ini menjadi akses utama yang menghubungkan antara kota Merauke dengan daerah transmigrasi yaitu Distrik Semangga, Tanah Miring, Kurik, Salor, dan Semangga.

Hambatan-hambatan dalam pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi diantaranya adalah :

- Pengadaan bahan-bahan material sering mengalami keterlambatan karena alat angkut yang berupa kapal laut frekuensinya terbatas.

- Sarana transportasi seperti jalan dan jembatan di beberapa lokasi kurang memadai sehingga mengganggu pendistribusian bila cuaca tidak kondusif.
- Jarak dan akses ke beberapa daerah masih sulit ditempuh dengan menggunakan akses jalan darat. Selain itu letak daerahnya juga berada di tebing dan dataran tinggi.

Efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya maupun biaya juga menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien". Dalam pembangunan kawasan transmigrasi penggunaan dana maupun sumberdaya yang ada dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang keberhasilan program transmigrasi. Melalui kebijakan model *bottom-up* pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya untuk pembangunan kawasan transmigrasi khususnya, hal ini dilakukan karena pemerintah beranggapan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa-desa agar dapat melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris Kampung Semangga Jaya berikut :

"...kalau untuk pemerintah daerah, sekarang sudah lebih memperhatikan pembangunan, setiap desa atau kampung-kampung diberikan anggaran guna pembangunan, dengan adanya langkah seperti itu kami memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun. Kami lebih memilih untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketimbang membagikan uang secara langsung kepada masyarakat, kami menilai hal ini sangat tidak

efektif dan merupakan pemborosan, maka dari itu kami lebih memilih untuk pembangunan di kawasan transmigrasi ini...”
(untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, wawancara dilakukan kembali pada tanggal 03 Juni 2018)

Pembangunan daerah transmigrasi yang telah diatur dalam undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian, dimana setiap daerah atau wilayah transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan warga sekitar dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jenis transmigrasinya.

Dalam kebijakan publik terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu efisiensi. Efisiensi yang dimaksudkan adalah pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun keuangan. Dalam pengelolaannya, apabila sumber daya dimanfaatkan secara tepat, maka bukan tidak mungkin suatu kebijakan tersebut akan berhasil. Dalam pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Merauke, pemanfaatan sumber daya dilakukan sebaik mungkin untuk pemerataan pada setiap daerah dan lebih ditekankan sesuai kebutuhan seperti jalanan maupun sarana dan prasarana sehingga akan terlihat pada masa sekarang.

Kebijakan program transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *bottom up* yang didasarkan pada masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya namun pada tataran rendah.

c. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Program transmigrasi yang terlaksana di Kabupaten Merauke dilakukan secara merata, tidak hanya kepada masyarakat transmigrasi itu sendiri melainkan juga kepada masyarakat lokal sekitar wilayah transmigrasi. Hal ini nampak pada wawancara dengan informan RD berikut :

“...pada dasarnya program ini ditujukan tidak hanya kepada kami sebagai masyarakat transmigrasi, tetapi juga kepada masyarakat lokal disini, tujuan dari transmigrasi ini agar kami sebagai pendatang bisa berbaur dengan masyarakat lokal, saling membantu....”

(wawancara dilakukan pada tanggal 05 Juni 2018 pukul 15.00)

Perataan suatu program yang ditujukan kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat trans dan masyarakat lokal agar tidak ada kesenjangan, perataan pembangunan juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena disetiap daerah berbeda kondisi geografisnya.

Ketepatan merujuk pada nilai dan harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif.

Sasaran program transmigrasi di Kabupaten Merauke bukan hanya ditujukan kepada masyarakat transmigran, tetapi juga kepada masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan program transmigrasi itu sendiri yang untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar; mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan; dan pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

a. Pasar lokal

Sesuai gambar 12 adalah pasar lokal yaitu pasar khusus bagi penduduk asli Papua yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Pasar ini dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke berbentuk lapak-lapak dagangan yang di khususkan bagi mama-mama Papua (sebutan untuk ibu-ibu di Papua). Pasar ini didirikan sejak tahun 2005, hingga saat ini pasar tersebut masih beroperasi dan menjadi kegiatan perekonomian bagi masyarakat setempat.

Gambar 12 pasar khusus masyarakat lokal (Sumber Dokumentasi Pribadi)



b. Pasar lokal di Distrik Semangga

Sesuai gambar 13 adalah pasar yang terletak di Distrik Semangga. Pasar ini juga diperuntukan bagi masyarakat lokal atau masyarakat Papua guna menjual hasil-hasil perkebunan. Pasar ini dibangun bersamaan dengan pasar lokal yang ada di Distrik Kurik dan hingga saat ini masih digunakan namun dengan kondisi pasar yang kurang terawat. Jarak antara pasar dengan pemukiman penduduk berjarak 2,5 Km dengan kondisi jalan baik.

Gambar 13 pasar lokal di Distrik Semangga (Sumber :Dokumentasi Pribadi)



Gambar 14 kondisi jalan menuju pasar dan akses utama jalan kampung/Desa semangga (Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Tabel 6 Data Statis Sarana dan Prasarana Umum Distrik Semangga

No	Sarana Perekonomian	
	Koperasi	Jumlah
1	a. Koperasi Simpan pinjam	2
	b. Koperasi Unit Desa	1
	c. BKK	-
	d. BPKD	-
	e. Badan-badan kredit	-
	f. Koperasi Produksi	1
	g. Koperasi Konsumsi	1
	h. Koperasi Lainnya	-
	2	Jumlah Pasar
a. Pasar Daerah		-
b. Pasar Desa/Kampung		1
3	Sarana dan Prasarana Umum	
	a. Toko/Minimarket/Supermarket	9
	b. Perbankan	4
	c. Pelabuhan	-
	d. Stasiun Kereta Api	-
	e. Terminal Angkutan darat	1
	f. Telepon Umum	-
4	Jenis Usaha	
	A). Industri	
	a. Besar	6
	b. Kecil	10
	c. Rumah Tangga	7
5	Akses jalan dan Jembatan	
	a. Jalan Utama/Poros	201 KM
	b. Jembatan beton	500 M
	c. Jembatan Kayu	300 M

Sumber Data olahan : Kantor Distrik Semangga

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Distrik Semangga. Adanya koperasi, pasar, serta sarana dan prasarana dan juga industri kecil hingga industri besar yang

juga ditunjang oleh akses jalan dan jembatan sepanjang 201 KM untuk jalan utama dan 500 M jembatan beton serta 300 M jembatan kayu. Dengan adanya akses tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mobilitasnya sehari-hari. Pembangunan pun akan dilakukan kembali secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Merauke.

Tabel 7 Data Statis Sarana dan Prasarana Umum Distrik Kurik

No	Sarana Perekonomian	
	Koperasi	Jumlah
1	a. Koperasi Simpan pinjam	4
	b. Koperasi Unit Desa	1
	c. BKK	-
	d. BPKD	-
	e. Badan-badan kredit	-
	f. Koperasi Produksi	1
	g. Koperasi Konsumsi	1
	h. Koperasi Lainnya	-
	2	Jumlah Pasar
a. Pasar Daerah		-
b. Pasar Desa/Kampung		2
3	Sarana dan Prasarana Umum	
	a. Toko/Minimarket/Supermarket	11
	b. Perbankan	4
	c. Pelabuhan	-
	d. Stasiun Kereta Api	-
	e. Terminal Angkutan darat	2
	f. Telepon Umum	-
4	Jenis Usaha	
	A). Industri	
	a. Besar	8
	b. Kecil	4
	c. Rumah Tangga	4
5	Akses jalan dan Jembatan	
	a. Jalan Utama/Poros	228 KM
	b. Jembatan beton	301 M
	c. Jembatan Kayu	-

Sumber Data olahan : kantor Distrik Kurik Kabupaten Merauke

Perataan tujuan program transmigrasi di Kabupaten Merauke dilakukan kepada seluruh masyarakat, dengan berkembangnya kawasan transmigrasi juga akan mempengaruhi bagi pemerataan program tersebut. Dengan adanya program tersebut masyarakat bisa lebih berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat lokal. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di pusat perkotaan Merauke, melainkan juga dilakukan di setiap kampung terutama kampung-kampung transmigrasi agar tujuan dari pemerataan program dapat menyentuh seluruh kawasan di Kabupaten Merauke.

d. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Merauke ditujukan tidak hanya kepada masyarakat trans melainkan juga untuk masyarakat lokal agar program tersebut tepat pada sasaran kebijakan dan ketepatan serta perataan pembangunan.

Hal ini nampak pada wawancara dengan informan SL berikut :

“...setahu saya, program transmigrasi ini tidak hanya ditujukan kepada kami para transmigran, tetapi juga kepada masyarakat lokal, selain itu program-program pembangunan transmigrasi juga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di wilayah transmigrasi itu sendiri, alokasi dananya pun diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah...”

Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya.

Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Kebijakan publik juga dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan didapatkan oleh sasaran kebijakan publik yang didalamnya terdapat kriteria kesamaan yang erat dengan rasionalitas legal dan sosial yang merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan mencirikan bahwa kebijakan tersebut adil untuk didistribusikan yang mungkin saja dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Sasaran program transmigrasi di Kabupaten Merauke bukan hanya ditujukan kepada masyarakat transmigran, tetapi juga kepada masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan program transmigrasi itu sendiri yang untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang

menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar; mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan; dan pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perataan tujuan program transmigrasi di Kabupaten Merauke dilakukan kepada seluruh masyarakat, dengan berkembangnya kawasan transmigrasi juga akan mempengaruhi bagi pemerataan program tersebut. Dengan adanya program tersebut masyarakat bisa lebih berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat lokal.

A. Dampak Sosial dan Ekonomi

Kebijakan program transmigrasi tidak hanya berpengaruh pada pembangunan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat. Adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Program transmigrasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Merauke tidak hanya memberikan dampak terhadap pembangunan, tetapi juga dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat kabupaten Merauke adalah pendatang yang merupakan masyarakat transmigrasi yang mendiami beberapa wilayah lokasi transmigrasi. Kehidupan sosial masyarakat kawasan transmigrasi cukup

kompleks karena adanya dua budaya dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dalam satu lingkungan bermasyarakat dan kehidupan masyarakat transmigrasi mengalami banyak perubahan serta perkembangan setelah periode transmigrasi. Kebijakan program transmigrasi tidak hanya berpengaruh pada pembangunan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat. Adanya perubahan pola kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Program transmigrasi juga memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Merauke, sebelum program ini dilaksanakan, banyak wilayah-wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau karena akses jalan yang terbilang masih rusak parah, namun pada masa sekarang sudah banyak kawasan-kawasan terpencil yang sudah bisa diakses melalui jalan darat meskipun terkadang jika cuaca tidak kondusif.

a. Sosial

Kehidupan sosial masyarakat lokal di kawasan transmigrasi banyak mengalami perubahan yang datang dari luar. Pengaruh transmigrasi terhadap perkembangan masyarakat di kawasan-kawasan transmigrasi saat ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan perkembanganyang sangat berpengaruh dan berdampak pada kemajuan wilayah transmigrasi.

Ini nampak pada hasil wawancara dengan informan WR berikut :

“...Sampai saat ini kehidupan sosialnya pun tidak ada konflik antara pendatang maupun masyarakat lokal, walaupun ada itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab, kami sangat bersyukur di daerah ini dulu ada trans karena sekarang daerah ini menjadi berkembang...” (wawancara dilakukan tanggal 10 Mei pukul 09.00)

Kehidupan sosial masyarakat kawasan transmigrasi terbilang cukup kompleks karena adanya dua budaya dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dalam satu lingkungan bermasyarakat. Selama melakukan pengamatan, penulis mengamati bahwa kehidupan masyarakat kawasan transmigrasi mengalami banyak perubahan serta perkembangan.

Pemerintah tidak hanya memperhatikan kehidupan penduduk transmigrasi tetapi juga masa depan para anak-anak transmigran, hampir diseluruh kawasan transmigrasi terdapat bangunan-bangunan sekolah mulai dari Sekolah dasar hingga Sekolah Tingkat Atas. Dimasing-masing kawasan transmigrasi terdapat beberapa bangunan sekolah diantaranya di Distrik Semangga, penyediaan sarana fisik pendidikan berupa tenaga guru, jumlah sekolah, dan fasilitas sekolah yang memadai merupakan hal yang penting yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi penduduk usia sekolah terhadap pendidikan. Pada tahun 2016, jumlah sekolah menurut Dinas Pendidikan dan Pengajaran, di Distrik Semangga sebanyak 15 unit, dimana jumlah SD sebanyak 11 unit yang terdiri dari 7 SD negeri dan 4 SD swasta, untuk jumlah SLTP di Distrik

Semangga terdapat 3 unit, dan untuk jumlah SLTA sebanyak 1 unit yang terdapat di Kampung Urumb. Jumlah SD sebanyak 1.812 orang yang terdiri dari 1.356 orang siswa/siswi negeri dan siswa/siswi swasta, jumlah murid SLTP sebanyak 677 orang, dan jumlah murid SMA negeri ada sebanyak 53 orang. Sedangkan jumlah guru di SD 88 orang, SMP 50 orang, dan SMA 14 orang.

Sementara itu, Penyediaan sarana fisik pendidikan berupa tenaga guru, jumlah sekolah, dan fasilitas sekolah di Distrik Muting pada tahun 2016, jumlah sekolah di Distrik Muting sebanyak 15 unit yang terdiri dari 12 unit Sekolah Dasar, 2 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian di Distrik Kurik Pada tahun 2016, jumlah sekolah di Distrik Kurik sebanyak 17 unit, dimana jumlah Sekolah Dasar sebanyak 12 unit, jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 4 unit, dan jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 unit.

Tabel 8 Jumlah Sarana Pendidikan Distrik Semangga Kabupaten Merauke

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Sekolah Dasar	11
2	Sekolah Menengah Pertama	3
3	Sekolah Menengah Atas	1
4	Sekolah Menengah Kejuruan	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Merauke (Distrik Semangga Dalam Angka 2017)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Semangga terlihat cukup baik dengan memiliki 11 unit bangunan Sekolah Dasar, 3 unit bangunan Sekolah

Menengah Pertama, 1 unit bangunan Sekolah menengah Atas, untuk Sekolah Menengah Kejuruan ditempatkan di Kabupaten Merauke karena dilihat dari kondisi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 9 Jumlah Sarana Pendidikan Distrik Muting Kabupaten Merauke

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Taman kanak-kanak	4
2	Sekolah Dasar	12
3	Sekolah Menengah Pertama	2
4	Sekolah Menengah Atas	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Merauke (Distrik Muting Dalam Angka 2017)

Jumlah sarana pendidikan di Distrik Muting yang terdiri dari Taman Kanak-kanak sebanyak 4 unit, Sekolah Dasar sebanyak 12 unit, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 unit dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 unit. Untuk Sekolah Menengah Atas yang terdapat di Distrik Muting di tempatkan di kampung Bupul 1 yang lokasinya mudah diakses dari lokasi lainnya, karena jarak dari Distrik Muting menuju ke Kabupaten Merauke berjarak sekitar 280 KM atau dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam perjalanan (tergantung kondisi jalan dan cuaca).

Tabel 10 Sarana Pendidikan Distrik Kurik Kabupaten Merauke

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Sekolah Dasar	12
2	Sekolah Menengah Pertama	4
3	Sekolah Menengah Atas	1
4	Sekolah Menengah Kejuruan	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Merauke (Distrik kurik Dalam Angka 2017)

Sementara untuk sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Kurik Memiliki 12 unit Sekolah Dasar, 4 unit Sekolah Menengah Pertama dan 1 unit Sekolah Menengah Atas, untuk Sekolah menengah kejuruan ditempatkan di Kota Merauke karena lokasinya tidak terlalu jauh dan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit, tetapi kebanyakan para siswa lebih memilih untuk tinggal di perkotaan.

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi tidak hanya berfokus pada sektor perekonomian tetapi juga pada sisi pendidikan, dengan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan transmigrasi pemerintah berharap anak-anak dari para transmigran dapat mengenyam pendidikan yang layak dimana mereka berada, meskipun masih tertinggal tetapi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi cukup baik.

Pendidikan juga salah satu aspek penting dalam pembangunan karena mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai titik sentral pembangunan. Berorientasi pada peningkatan kualitas manusia maka peranan pendidikan dalam pembangunan dapat meningkatkan manusia sebagai makhluk individu yang potensial.

b. Budaya

Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya ada pada aspek sosial, melainkan pada sisi budayanya, dalam hal ini adalah budaya-budaya

adat-istiadat dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tercampur oleh budaya dari daerah lain namun tetap menghormati adat dari budaya lain.

Dampak dari program transmigrasi terhadap budaya yang ada pada masyarakat kawasan transmigrasi telah berbaur dengan adat dari masyarakat lokal, misalnya adanya perkawinan campur antara penduduk lokal dan warga transmigran yang memiliki keturunan dengan ciri yang unik, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami oleh seluruh masyarakat (kecuali bahasa dari masing-masing suku).

penduduk Merauke sudah heterogen dari berbagai etnis yang ada di Nusantara mulai dari suku asli Merauke (Marind, Jei, Kanum dan Kimaam) juga suku suku lain seperti maluku, Timor, Bugis Makasar, Manado, Banjar, Dayak, Jawa, Batak dan Aceh juga ada di Merauke, dan hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan juga Data Pemerintah Kabupaten Merauke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah Penduduk yang Non Papua lebih besar mencapai 63 % dari jumlah penduduk atau kurang lebih 185.718 jiwa dan sebagian besar adalah suku Jawa. Hal ini disebabkan sejak masa bergabungnya Irian Barat ke NKRI tahun 1963 sudah ada upaya Pemerintah mendatangkan transmigrasi yang ditempatkan pada Pinggiran Kota Merauke yaitu di Kampung Semangga Jaya, Kampung Harapan Makmur, Kampung Telaga Sari, Kampung Seed agung dan Sigabel Jaya Distrik Muting. Dan pada masa Orde Baru era Tahun 80-an kembali program transmigrasi digalakan dalam rangka pemerataan penduduk

sekaligus mengolah Sumber Daya Alam yang begitu luas dengan potensi pertanian yang sangat menjanjikan yang terbagi dalam wilayah pemerintahan pada Kabupaten Merauke di 20 Distrik (Kecamatan), 8 (delapan) Kelurahan dan 160 Kampung/ desa.

Adanya penyebaran budaya yang dilakukan oleh satu kelompok ke kelompok lain terjadi hampir diseluruh kawasan-kawasan transmigrasi, penyebaran budaya lain bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat dikarenakan cocok dan berguna bagi seluruh masyarakat kawasan transmigrasi baik masyarakat lokalnya maupun masyarakat transmigrasi. Penyebaran budaya antar kelompok disebabkan adanya kontak antar masyarakat serta interaksi dalam kehidupan mereka.

Akulturasasi dalam kehidupan masyarakat lokal disebabkan oleh budaya yang dibawa oleh masyarakat transmigrasi lambat laun akan diterima tanpa menghilangkan budaya asli mereka dan proses tersebut memakan waktu yang cukup lama.

Tabel 11 Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2010, 2015, 2016

No.	Nama Kabupaten	2010	2015	2016
1	Merauke	197.301	216.585	220.006
2	Jayawijaya	197.719	204.112	206.320
3	Jayapura	112.877	119.383	121.410
4	Nabire	130.900	137.776	140.178
5	Biak Numfor	127.779	135.831	139.171
6	Paniai	154.716	162.489	164.280
7	Puncak Jaya	102.002	113.280	115.310

8	Mimika	183.491	199.311	201.677
9	Boven Digoel	56.300	61.283	63.020
10	Mappi	82.302	89.790	91.876
11	Asmat	77.278	86.614	88.578
Jumlah		1.422.665	1.526.454	1.551.826
12	Kepulauan Yapen	83.606	89.994	91.404
13	Yahukimo	165.912	178.193	181.326
14	Peg. Bintang	65.982	70.697	71.710
15	Tolikara	115.381	127.526	131.323
16	Sarmi	33.305	35.787	36.797
17	Keerom	49.020	53.002	53.694

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke

c. Aktivitas Ekonomi

Dampak dari program transmigrasi bukan hanya pada kehidupan sosial masyarakatnya tetapi juga pada aktivitas perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan itu, informan AN menyampaikan bahwa ;

“...ada peningkatan perekonomian setelah program transmigrasi ini, bahkan sampai sekarang pengaruhnya sangat terasa, untuk masyarakat trans maupun masyarakat lokalnya, pembukaan lahan transmigrasi juga menguntungkan kami karena ada beberapa perusahaan yang berdiri disini sehingga tidak sedikit masyarakat yang bekerja di perusahaan itu...” (wawancara tanggal 15 Mei 2018)

Berdasarkan observasi yang dilakukan di beberapa wilayah transmigrasi, ada beberapa perusahaan besar yang bergerak diberbagai sektor seperti PT. Korindo Group Merauke, PT. Sawa Erma, PT. Medcho, PT. Chonblok, PT. Dolarossa, PT. Tunas Jaya Irja yang berdiri di wilayah transmigrasi. Dengan adanya pembukaan lahan yang dilakukan maka

banyak perekonomian lintas sektoral yang berkembang sehingga wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kabupaten Merauke adalah penghasil tanaman padi terbesar di Provinsi Papua. Pada tahun 2015 produksi padi di Kabupaten Merauke adalah sebesar 190.496,36 ton. Terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya dikarenakan curah hujan yang cukup di wilayah Kabupaten Merauke.

Adanya perbedaan jumlah penduduk dan produksi padi di tiap Distrik membuat kebutuhan pangan menjadi tidak seimbang dalam cakupan wilayah Kabupaten. Beberapa Distrik mengalami jumlah produksi padi yang melimpah melebihi kebutuhan per kapita maka hal ini dapat di asumsikan sebagai *Surplus Pangan*. Sedangkan beberapa Distrik mengalami kekurangan produksi padi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan per kapita maka hal ini dapat di asumsikan sebagai *Devisit Pangan*.

Ketidak seimbangan pangan di tiap distrik memaksa pemerintah untuk melakukan penyeimbangan logistik beras dengan sarana transportasi guna memenuhi kebutuhan beras di setiap distrik. Jalur Darat adalah prioritas dalam pengantaran logistik untuk menstabilkan kebutuhan akan permintaan beras di setaip Distrik.

Berikut adalah analisis *Surplus or Divisit* pangan di Kabupaten Merauke:

Tabel 12 Jumlah Penduduk per Distrik di Kabupaten Merauke Tahun 2010 ,2015, 2016

No.	Nama Distrik	2010	2015	2016
1	Kimaam	5.659,00	6.321,00	6.439,00
2	Waan	4.403,00	4.878,00	4.962,00
3	Tabonji	4.989,00	5.583,00	5.691,00
4	Ilwayab	4.989,00	5.577,00	5.683,00
5	Okaba	4.794,00	5.316,00	5.409,00
6	Tubang	2.190,00	2.439,00	2.484,00
7	Ngguti	1.834,00	2.039,00	2.075,00
8	Kaptel	1.697,00	1.893,00	1.928,00
9	Kurik	13.261,00	14.459,00	14.670,00
10	Animha	1.899,00	2.119,00	2.159,00
11	Malind	8.822,00	9.665,00	9.814,00
12	Merauke	88.342,00	96.951,00	98.478,00
13	Naukenjerai	1.846,00	2.041,00	2.076,00
14	Semangga	12.911,00	14.061,00	14.263,00
15	Tanah Miring	16.896,00	18.428,00	18.699,00
16	Jagebob	6.993,00	7.591,00	7.697,00
17	Sota	2.856,00	3.163,00	3.217,00
18	Muting	5.075,00	5.542,00	5.624,00
19	Elikobel	3.775,00	4.106,00	4.164,00
20	Ulilin	4.070,00	4.413,00	4.474,00
Jumlah		197.301,00	216.585,00	220.006,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk tiap tahunnya terus bertambah. Pada Tahun 2015, total penduduk di kabupaten merauke meningkat sebesar 9,77 persen. Sedangkan tahun 2016 meningkat jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 1,58 persen.

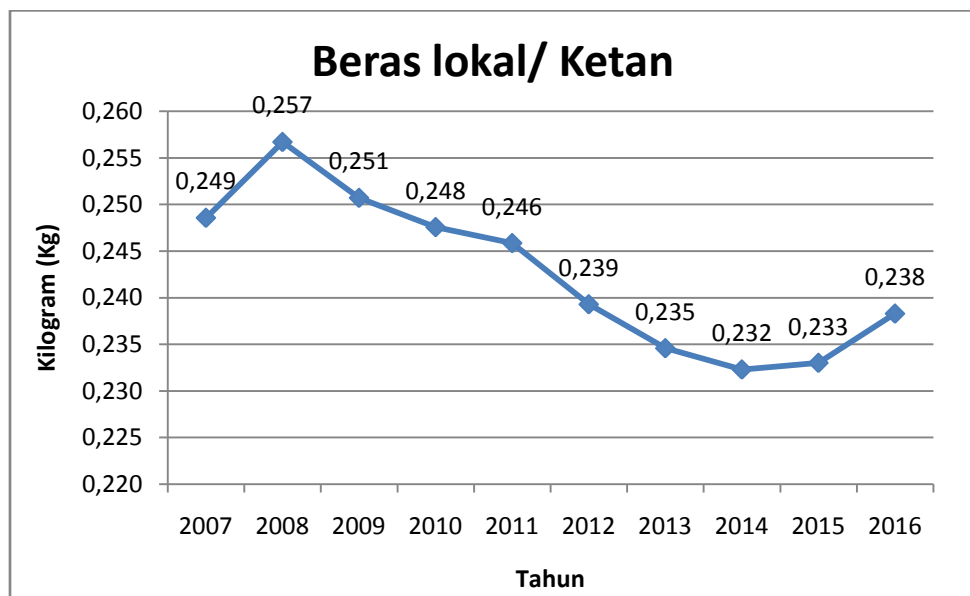
Tabel 13 Jumlah Produktifitas Padi per Distrik di Kabupaten Merauke, Tahun 2016

No.	Nama Distrik	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Kimaam	215,00	215,00	645,00	3,00
2	Waan	130,00	130,00	390,00	3,00
3	Tabonji	106,00	106,00	318,00	3,00
4	Ilwayab	25,00	25,00	0,00	0,00
5	Okaba	88,30	88,30	264,90	3,00
6	Tubang	40,00	40,00	112,00	2,80
7	Ngguti	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kaptel	20,00	20,00	56,00	2,80
9	Kurik	11.725,00	11.705,00	49.161,00	4,20
10	Animha	58,00	58,00	174,00	3,00
11	Malind	6.166,25	6.108,75	25.656,75	4,20
12	Merauke	1.293,50	1.293,50	6.211,20	4,80
13	Naukenjerai	550,00	550,00	1.650,00	3,00
14	Semangga	8.022,00	7.986,00	38.332,80	4,80
15	Tanah Miring	14.148,00	13.587,00	61.141,50	4,50
16	Jagebob	1.053,50	1.053,50	4.214,00	4,00
17	Sota	19,25	16,25	55,09	3,39
18	Muting	62,00	62,00	167,40	2,70
19	Elikobel	378,50	378,50	1.156,32	3,06
20	Ulilin	247,00	247,00	790,40	3,20
Jumlah		44.347,30	43.669,80	190.496,36	4,36

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah panen dalam Tahun 2016 di kabupaten merauke meningkat sebesar 23,97 persen. Dari 153.661,09 ton menjadi 190.496,46 ton.

Berikut adalah statistik rata - rata jumlah konsumsi logistik beras per kapita perhari beras lokal atau ketan di Indonesia tahun 2007-2016:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 28. Diagram jumlah rata-rata konsumsi beras per kapita dalam sehari di Indonesia tahun 2007 – 2016

Perhitungan rata - rata konsumsi perhari per kapita atas adalah jumlah makan sebanyak 2 kali dalam sehari. Tahun 2008 adalah puncak tertinggi statistik rata - rata konsumsi per kapita perhari di Indonesia yaitu mencapai 0,257 kg per hari atau setara dengan 1 kg beras untuk 8 orang dalam sekali makan.

Tabel 14 Jumlah *Surplus or Devisit* Padi per Distrik di Kabupaten Merauke, Tahun 2016

No.	Nama Distrik	Surplus (ton)	Devisit (ton)
1	Kimaam		-138,41
2	Waan		-213,71

3	Tabonji		-374,41
4	Ilwayab		-691,43
5	Okaba		-393,20
6	Tubang		-190,22
7	Ngguti		-252,46
8	Kaptel		-178,57
9	Kurik	47.376,15	
10	Animha		-88,68
11	Malind	24.462,71	
12	Merauke		-5.770,29
13	Naukenjerai	1.397,42	
14	Semangga	36.597,47	
15	Tanah Miring	58.866,46	
16	Jagebob	3.277,53	
17	Sota		-336,31
18	Muting		-516,85
19	Elikobel	649,70	
20	Ulilin	246,06	
Jumlah		172.873,50	-9.144,54
Jumlah Total			163.728,96
Surplus			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke

Jumlah produktifitas padi terbesar terdapat di Distrik Tanah Miring yaitu 32 persen dari hasil panen tahun 2016 dengan *surplus* sebesar 58.866,46 ton. Selanjutnya adalah Distrik Kurik yang menghasilkan produktivitas padi 26 persen dengan *surplus* 47.376,15 ton. Distrik semangga turut menyumbang *surplus* ketiga terbesar yaitu 36.597,47 ton dengan perolehan total produktifitas 20 persen. Sedangkan *devisit* terbesar di tahun 2016 terdapat pada Distrik Merauke sebesar 5.770,29 ton, Distrik Ilwayab sebesar 691,43 ton dan Distrik Muting sebesar 516,85 ton.

Devisit yang terjadi pada Distrik Merauke dipicu oleh lokasi Distrik Merauke yaitu Ibu Kota Kabupaten Merauke yang menjadi centra pemerintahan dan pusat bisnis di Kabupaten Merauke menjadikan Kabupaten Merauke menjadi tarikan pendudukan terbesar dengan jumlah penduduk tertinggi yakni 98.478 orang dari 20 Distrik yang ada. Hal ini jelas menimbulkan devisit dimana produktivitas padi hanya mencapai 6.211,20 ton. Hakikatnya Distrik Merauke hanya mampu mencukupi kebutuhan beras sebanyak 51.050,95 orang.

Dengan jumlah *surplus* sebesar 163.728.96 ton, maka Kabupaten Merauke dapat mengirim beras ke beberapa kabupaten di Provinsi Papua guna memenuhi kebutuhan pangan di tanah Papua. Berikut adalah perhitungan kesanggupan Distrik Merauke dalam memenuhi kebutuhan pangan di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua.

Tabel 15 Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2010, 2015, 2016

No.	Nama Kabupaten	2010	2015	2016
1	Merauke	197.301	216.585	220.006
2	Jayawijaya	197.719	204.112	206.320
3	Jayapura	112.877	119.383	121.410
4	Nabire	130.900	137.776	140.178
5	Biak Numfor	127.779	135.831	139.171
6	Paniai	154.716	162.489	164.280
7	Puncak Jaya	102.002	113.280	115.310
8	Mimika	183.491	199.311	201.677
9	Boven Digoel	56.300	61.283	63.020
10	Mappi	82.302	89.790	91.876
11	Asmat	77.278	86.614	88.578

Jumlah		1.422.665	1.526.454	1.551.826
12	Kepulauan Yapen	83.606	89.994	91.404
13	Yahukimo	165.912	178.193	181.326
14	Peg. Bintang	65.982	70.697	71.710
15	Tolikara	115.381	127.526	131.323
16	Sarmi	33.305	35.787	36.797
17	Keerom	49.020	53.002	53.694
No.	Nama Distrik	2010	2015	2016
18	Waropen	24.919	27.723	28.395
19	Supiori	15.990	17.288	18.186
20	Mamberamo Raya	18.490	20.514	21.523
21	Nduga	79.702,00	92.530,00	94.173,00
22	Lanny Jaya	149.688,00	170.589,00	172.625,00
	Mamberamo	39.908,00	45.398,00	46.321,00
23	Tengah			
24	Yalimo	51.218,00	57.585,00	58.891,00
Jumlah		2.315.786,00	2.510.179,00	2.554.773,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke

Selain itu, sebagian dari masyarakat transmigrasi tidak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, seperti contohnya masyarakat kawasan transmigrasi di distrik Muting justru lebih bergantung kepada perusahaan tersebut. Hal ini nampak pada wawancara dengan informan AL berikut :

“...di Distrik Muting ini sebagian masyarakat tran menggantungkan hidupnya pada perusahaan karena disini tidak seperti daerah transmigrasi yang lainnya yang berhasil dalam bidang pertanian karena kondisi tanahnya tidak cocok untuk tanaman pangan, hanya cocok untuk tanaman industri tahunan seperti karet, kopra, dan kelapa sawit, sebelum ada perusahaan disini, masyarakat menganggap tidak ada dampak yang timbul dari program trans sehingga banyak dari mereka yang pindah ke daerah lain, tetapi

baru sekarang mulai terlihat...” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei)

Dengan adanya kegiatan perekonomian lintas sektoral yang ada di kawasan-kawasan transmigrasi dapat memicu adanya kegiatan perekonomian, hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan suatu program atau kebijakan serta tidak terlepas dari peran pemerintah daerah.

Kegiatan lintas sektoral yang ada di kawasan-kawasan transmigrasi salah satunya adalah berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, dari data yang diperoleh terdapat beberapa perusahaan yang berdiri diatas lahan kawasan pengembangan transmigrasi diantaranya PT. Korindo Group Merauke, PT. Sawa Erma, PT. Medcho, PT. Chonblok, PT. Dolarossa, PT. Tunas Jaya Irja yang berdiri di kawasan transmigrasi.

Selain itu aktivitas perekonomian pada daerah-daerah transmigrasi yang berbasisi pertanian adalah usaha penggilingan padi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat trans. Dari beberapa lokasi transmigrasi, masing-masing memiliki usaha penggilingan padi, depot air minum, minimarket, dan usaha-usaha kecil menengah lainnya.

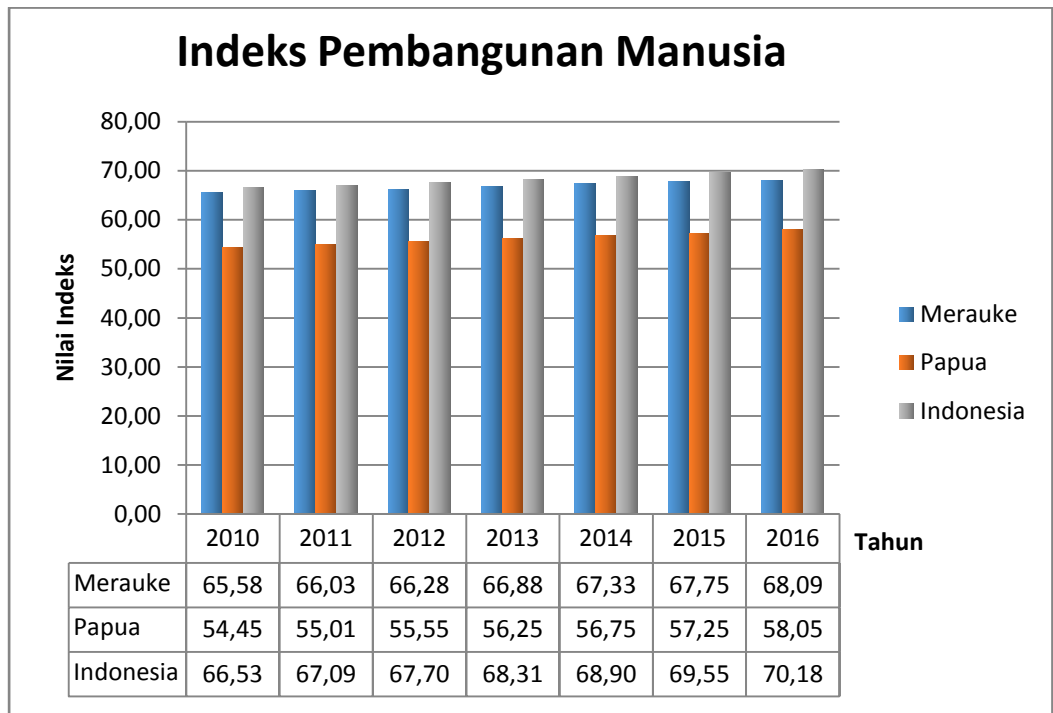
Secara umum besarnya capaian IPM Kabupaten Merauke selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan usaha-usaha pembangunan manusia telah berjalan,

meskipun ada yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada pula yang perkembangannya lambat.

Selain realisasi dari kondisi ekonomi sebagaimana telah dikemukakan diatas, indikator lain untuk melihat taraf kesejahteraan masyarakat yang biasa digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penduduk Miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prediksi pencapaian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

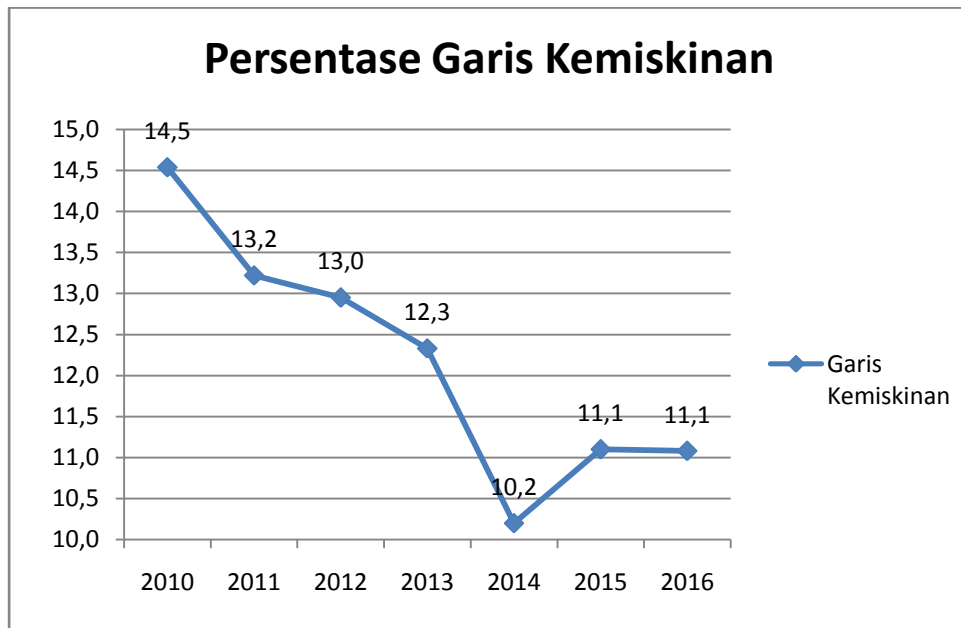
1. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke mencapai 68,09 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 65,58 poin. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, yaitu diantaranya komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (kemampuan daya beli masyarakat). Angka IPM Kabupaten Merauke lebih tinggi di bandingkan angka IPM Provinsi Papua sesuai dengan klasifikasi *United Nations Development Programme* (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 14.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Merauke

Gambar 14 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 – 2016 Kabupaten Merauke

2. Indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Merauke yang di ukur dari tahun 2010 hingga tahun 2016 seperti yang terlihat pada Gambar.15.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Merauke

Gambar 15 Persentase Garis Kemiskinan Tahun 2014 – 2016
Kabupaten Merauke

Situasi perekonomian secara makro Kabupaten Merauke diukur dengan besarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun atau biasa dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan kinerja perekonomian diukur dari kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2010. Sementara struktur perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor. PDRB Kabupaten Merauke dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2010 (ADHK).

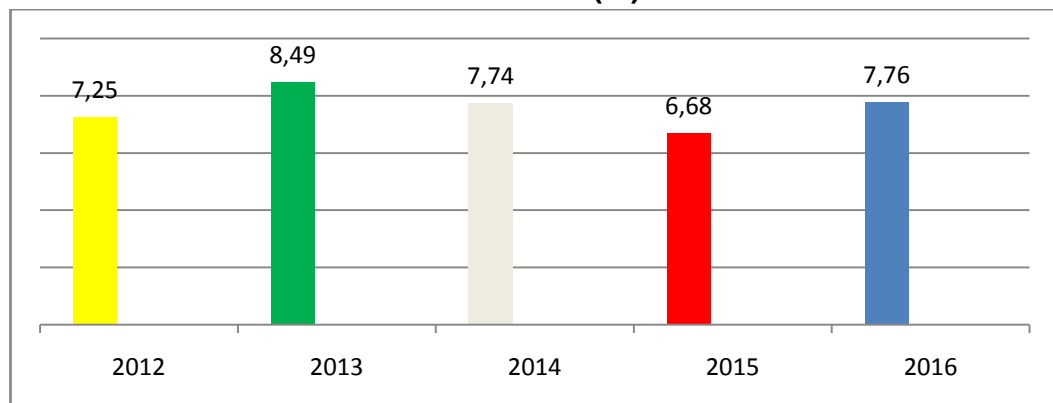
Kondisi ekonomi pada tahun 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap

PDRB Kabupaten Merauke sebesar 29,19 persen. Lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 17,14 persen. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil memberikan kontribusi sebesar 14,72 persen dari total PDRB Merauke. Lapangan usaha konstruksi selalu konsisten memberikan kontribusi cukup signifikan selama tahun 2012-2016, bahkan persentase sumbangan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Kontribusi lapangan usaha konstruksi menjadi yang utama sejak tahun 2012. Kontribusi kategori ini di tahun 2012 sebesar 12,12 persen, kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 13,11 persen. Besarnya peran lapangan usaha konstruksi sejak 2012 dipicu oleh meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pembangunan fisik infrastruktur. Penurunan secara berangsur-angsur kontribusi lapangan usaha pertanian dan peningkatan kontribusi dari tahun ke tahun untuk lapangan usaha konstruksi; perdagangan dan reparasi mobil ; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta informasi dan Komunikasi di dalam memberikan nilai tambah menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier.

Besarnya pengaruh program transmigrasi ini berdampak pada aktifitas perekonomian masyarakat, sebagian besar didapatkan dari sektor pertanian yang memang menjadi ujung tombak perekonomian di Merauke. Seluruh produksi beras dihasilkan dari kawasan-kawasan transmigrasi yang memiliki potensi besar dalam bidang pertaniannya. Saat ini Merauke

menjadi penopang pasokan beras untuk beberapa kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Pegunungan Bintang. Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada halaman sebelumnya, terlihat besarnya produksi dan produktifitas padi pada setiap kampung, dimana beberapa diantaranya adalah kampung yang menjadi kawasan transmigrasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Merauke tingkat perekonomian masyarakat Merauke khususnya masyarakat transmigrasi meningkat setiap tahunnya.

Tabel 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke Tahun 2012-2016 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke 2017 (Merauke Dalam Angka 2017)

Dari data diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan pada tahun 2012, pada tahun tersebut bersamaan dengan aktifitas panen padi di Distrik Semangga dan Distrik Kurik, puncak laju pertumbuhan terjadi pada tahun 2013 dimana laju pertumbuhan meningkat menjadi 8,49%. Dari data tersebut terlihat bahwa pengaruh dari program transmigrasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat Merauke. Program transmigrasi tidak hanya

untuk meratakan jumlah penduduk di wilayah Indonesia, melainkan juga untuk tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aktifitas perekonomian, selain itu juga untuk membuka wilayah administrasi baru. Dalam perkembangannya, program transmigrasi telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Merauke.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, pemerataan dan ketepatan program transmigrasi khususnya di Kabupaten Merauke telah banyak memberikan kontribusi pembangunan dan pengembangan pada tertinggal di beberapa wilayah. Dampak dari program transmigrasi ini telah banyak dirasakan oleh masyarakat mulai dari percepatan pembangunan, pertumbuhan pusat perekonomian, hingga terbentuknya wilayah administratif baru. Kebijakan program transmigrasi menjadi langkah pemerintah guna pemerataan pembangunan, meskipun hal tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya, masih banyak daerah yang masih tertinggal dengan daerah lain karena pada dasarnya berbeda kondisi geografisnya.

Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Merauke berjalan sesuai dengan tujuan transmigrasi yaitu pemerataan jumlah penduduk, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat trans maupun masyarakat lokal. Namun masih ada beberapa wilayah transmigrasi yang masih tertinggal dengan wilayah transmigrasi lainnya dikarenakan kondisi geografisnya, secara keseluruhan program transmigrasi di Kabupaten Merauke telah berhasil dalam pembangunan daerah, serta berhasil meningkatkan perekonomian masyarakatnya dan beberapa wilayah

transmigrasi telah berkembang menjadi pusat perekonomian baru dan menjadi wilayah administratif baru. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada faktor lain yang juga turut membantu keberhasilan program transmigrasi, yaitu adanya kegiatan perekonomian lintas sektoral sehingga perekonomian masyarakatnya dapat meningkat bila dilihat dari sebelum transmigrasi sampai sesudah transmigrasi. Selain itu perkembangan wilayah transmigrasi berbeda-beda pada setiap daerah, hal itu disebabkan oleh kondisi wilayah yang berbeda kontur tanahnya tetapi memiliki kelebihan masing-masing sehingga dapat saling menopang. Keberhasilan masyarakat transmigrasi tidak sepenuhnya karena program transmigrasi melainkan ada faktor lain yang juga turut berperan serta dalam pembangunan wilayah transmigrasi.

Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan dan pemerataan program juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam program transmigrasi ini. Secara keseluruhan program transmigrasi telah berhasil dalam membantu pembangunan daerah tertinggal, meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan, meskipun masih ada beberapa wilayah yang belum terlihat perkembangan secara signifikan. Dari aspek sosialpun masyarakat transmigrasi dapat berbaur dengan masyarakat lokal yang ada di wilayah transmigrasi yang nyaris tidak ada konflik antar penduduknya yang disebabkan oleh perbedaan ras, suku, agama maupun budaya.

Keberhasilan program transmigrasi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang mampu menjamin bahwa para transmigran akan berhasil dimasa depan. Para transmigran dulunya tidak dibiarkan begitu saja setelah mereka tiba di daerah transmigrasi melainkan dijamin kehidupannya selama dua tahun oleh pemerintah sembari menyesuaikan diri pada lingkungan, setelah dianggap mampu maka mereka mengolah sendiri lahan-lahan pertanian yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Namun dalam prosesnya masih ditemukan adanya data “fiktif” mengenai penerima bantuan lahan dimana nama yang tercantum tidak sesuai dan nama tersebut tidak benar-benar ada bahkan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Pada perjalanannya program transmigrasi telah berhasil membuka lahan pertanian yang menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional serta pemasok beras terbesar di Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil pertanian para penduduk transmigrasi dan masyarakat lokal.

B. Saran

Sesuai dengan uraian kesimpulan diatas , peneliti mengemukakan saran antara lain :

1. Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat transmigrasi, agar terus mengembangkan sumber daya, menjaga keutuhan dalam kehidupan sosial dan melestarikan kekayaan

sumber daya alam di daerah transmigrasi agar bisa dimafaakat dikemudian hari.

2. Kepada pihak pemerintah daerah diharapkan untuk lebih pemeratakan pembangunan diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Merauke melalui program transmigrasi yang telah dirintis pada masa pemerintahan yang lalu agar tujuan-tujuan transmigrasi dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat lokal yang mendiami wilyah-wilayah transmigrasi.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi). 2016. Bandung. Alfabeta.

Bagoes Mantra, Ida. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada *University Press*

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. (2013). *Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung*. Provinsi Banten.

Hasibuan, Malayu S. P. 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi : Jakarta. Bumi Aksara

UU No 29 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kepmen. 220 2007 Tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan KTM Tahun 2007

Kepmen.214 2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi

Permen Nakertrans No 25 Tahun 2009 Tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran

Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Sekarang. 2015

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Heeren, H.J. Transmigrasi Di Indonesia. 1979. Jakarta. Gramedia.

Koentjaraningrat. 2007. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia.

Koentjaraningrat. 2005. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Manuwiyoto, Mirwanto. 2004. Mengenal dan Memahami Transmigrasi. Jakarta : Sinar Harapan

Miles, Matthew B, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Arizona State University. Third edition

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy* “Dinamika Kebijakan”. Jakarta : Elex Media Komputindo

Nova, Yosi, 2016. Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016: 23-36.

Slamet, Purboadiwidjojo. 1985. Mencari Suatu Sistem Dalam Pemindahan Penduduk Secara Besar-besaran Dalam Sepuluh Windu Transmigrasi Di Indonesia (1905-1985). UI Press. Jakarta.

Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah. Bappenas. Diunduh pada tanggal 25 Februari 2018 (04.31) Website www.bappenas.go.id/file/herrydarwanto
Jurnal :

Junaidi. 2014. forum diskusi perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi

Najati,dkk,2001. Studi Peluang Pengembangan *Corporate Farming* dan *Agroestate* Untuk Kawasan Transmigrasi, Puslitbang Ketransmigrasian, Badan Litbang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Depnakertrans.RI. Jakarta

Ratminto. 2009 Prospek Kelembagaan Transmigrasi: Demokratisasi Administrasi Program Transmigrasi.

Utomo, Wedy. 1994. Kontribusi Transmigrasi “Dalam Pembangunan Daerah” Jilid 3. Kementerian Transmigrasi. Jakarta.

Lampiran

a. Dokumentasi





b. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian “EVALUASI PROGRAM TRANSMIGRASI
(STUDI KASUS PROGRAM TRANSMIGRASI DI DISTRIK KURIK,
MUTING, DAN SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE)”

Waktu Penelitian :

I. Identitas Informan

- a. Nama Informan :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Usia :

II. Pertanyaan Wawancara

Evaluasi Program

1. Efektifitas :

- a. Menurut anda, apakah program transmigrasi sudah efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat lokal ? Ya/Tidak

Jawaban :

- b. Apakah program transmigrasi ini berhasil dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Merauke ?

Jawaban :

2. Efisiensi :

- a. Dalam pelaksanaannya, apakah sumber daya yang ada dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program transmigrasi ?

Jawaban :

- b. Menurut anda, apakah penggunaan dana dalam pembangunan kawasan transmigrasi sudah efisien ?

Jawaban :

3. Perataan :

- a. Menurut anda, apakah perataan program ini dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat lokal ?

Jawaban :

4. Ketepatan :

- a. Menurut anda, apakah program transmigrasi ini sudah tepat sasaran sesuai dengan tujuan program transmigrasi ?

Jawaban :

Dampak Sosial dan Ekonomi

- a. Menurut anda, apakah ada peningkatan perekonomian masyarakat melalui program transmigrasi ?

Jawaban :

b. Menurut anda, setelah program transmigrasi ini berjalan apakah ada peningkatan dalam aktivitas perekonomian masyarakat ?

Jawaban :

c. Setelah program transmigrasi dilaksanakan, apakah ada konflik sosial antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat lokal ?